

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Fajrun Najah Ahmad
Asal Partai Politik : Partai Demokrat
Jabatan : Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 99, Bandar Lampung.
Alamat Rumah : Jl. Perum Korpri Blok D.7 No. 17 Sukarame, Bandar Lampung
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Jawa
Pendidikan Terakhir : SMA / Tidak Tamat S1 .
No Tlp / HP : 0811798294
Waktu Wawancara : Jumat, 05 Oktober 2012 / 08. 00 – 09. 55 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Redaksi Tabloid Fokus.



(Proses wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: Dalam konteks bahwa demokrasi itu tidak mahal, kita mendukung itu. Tetapi kalau demokrasi diartikan bahwa setiap rakyat memiliki hak langsung untuk memilih maka memang sebaiknya dihindari, tetapi kalau mau efisien, efektif, dan lebih lebih terukur kualitas dan kapasitas calonnya memang melalui DPRD itu akan lebih baik, karena DPRD adalah perwakilan dari rakyat, ya kita sepakat saja sambil menunggu bagaimana perkembangan di DPR RI.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Memang sebetulnya kalau langsung memang yang paling mahal itu pada biaya penyelenggaraan. Ya bayangkan seperti Lampung ada 14 Kabupaten/Kota, ya walaupun tidak merata. Sekarang saja berapa ratus miliar kan yang diusulkan oleh KPU untuk pilgub 2013. Oleh karena itu kalau dilakukan di dewan, ini kan bisa lebih efektif, yang dana itu melalui APBD, dana yang sebanyak itu mungkin lebih jelas berdayaguna, bermanfaat, apabila itu dilakukan untuk pembangunan masyarakat, seperti insfrastuktur, pendidikan, kesehatan, kan gitu.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Biaya politiknya juga memang sangat tinggi bagi para tokoh yang akan maju dalam pilgub, dan tentunya itu pemborosan juga lah. Karena hitung-hitungan riil aja untuk pilkada langsung di Lampung ini tidak cukup seratus miliar, kan gitu, untuk pergerakan tim sukses, dan lain-lain sebagainya, alat daya dukung sebagainya. Tapi kalau itu dilakukan di dewan tentu kan secara financial juga akan lebih rendah, kenap, paling kan akan dilakukan lobi-lobi politik, selain waktu dan lain sebagainya. Karena kan ketika seseorang mau mencalonkan diri di pilgub kalau dia pejabat, maka kan otomatis akan mengurangi tugas dia diwaktu-waktu tertentu. Kalau bagi yang pejabat yang tau misalnya seperti Herman HN ketika hari sabtu-minggu kan kelilingnya, tapi kan untuk yang lain belum tentu begitu.

Ya betul. Secara logika kan begini, untuk menjadi seorang gubernur misalnya dia habis duit 200 miliar, kan bagaimanapun juga dia akan berupaya modalnya itu kembali kan. Apabila dia melakukan hal-hal yang

melanggar untuk mengembalikan dana dia miliki saja, apalagi kalau itu dana dari pinjaman, atau dan sebagainya, itu kan tentu ada membuat seseorang itu menjadi bisa saja melanggar aturan-aturan, dan itu yang tersangkut dalam berbagai kasus-kasus korupsi misalnya. Nah sebetulnya untuk di dewan kan lebih efisien dan efektif gitu.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab: Kalau otonomi daerah lebih terfokus pada kabupaten/kota itu memang betul, UU juga kan mengatur demikian. Gubernur adalah koordinator daerah tersebut yang dia harus membawa pesan-pesan pembangunan tingkat pusat bagi kepentingan daerah, oleh karena itu misalnya pemprov Lampung dia selalu menebar program-program sebaran dari pusat ke kabupaten/kota. Memang itu yang tepat, karena apa, karena kalau kabupaten/kota itu maju otomatis kan nama provinsi juga bagus. Hanya persoalannya adalah, karena otonomi daerah ini sehingga sinkronisasi program itu menjadi kadang-kadang tumpang-tindih. Tapi ini semua berproses kan.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Demokratis, karena dewan itu adalah lembaga perwakilan rakyat, artinya lembaga yang tugas-tugasnya adalah menyerap dan mewujudkan aspirasi yang berkembang di rakyat yang mereka wakili terutama. Itu demokratis, bukan berate kalau lewat dewan tidak demokratis, secara hukum ketatanegaraan, karena dewan kita adalah perwakilan rakyat, kan gitu.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Pandangan semacam itu tidak salah, tetapi kalau kita nilai cost politiknya sangat rendah, selain itu juga tidak menimbulkan gesekan-gesekan di sosial masyarakat ini, kan gitu. Kan tidak ada biaya lobi dan lain sebagainya itu wajar-wajar saja, semua juga adalah kita untuk mengumpulkan teman-teman tim sukses saja kan pasti, 10 orang misalnya ongkos pulang harus kita kasih kan gitu. Tetapi kalau ukurannya dari kaca mata efisiensi secara cost politik, memang itu lebih efisien, artinya permainan itu hanya disatu titik. Kalau ini kan harus ke Lampung Barat sana, yang bensin berapa, yang berapa jam, dan lain sebagainya kan. Ini kan cost politiknya tinggi, sementara dananya juga besar kita ini. Sementara kalau didewan, mereka ini kan perwakilan rakyat, melau partai-partai, kan lebih kecil tinggal bicara dengan pimpinan partai,

melobi-lobi partai, punya komitmen-komitment politik, dan lain sebagainya. Kalau soal dana cost politik atau berapa ininya itu kan relatif, kalau kita si di Demokrat tidak mengutamakan itu, manakala kita memang liat potensinya bagus, punya komitmen politik untuk melaksanakan program-program pro-rakyat, masalah anggaran dan lain sebagainya itu belakangan.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?

Jawab: Betul, yang betul memang 2009 ini, bahwa itu istilahnya No urut tidak berpengaruh lebih kepada bagaimana siapa yang mendapatkan dukungan dan itu juga secara moral mereka lebih mempunyai keterikatan kepada konstituennya, terjadi keseimbangan antara keterikatan kepada partai yang mengusungnya dan kepada konstituen. Dan sebaiknya itu yang dipertahankan untuk kedepan.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: Kalau kita begini, kan ini sedang dibahas oleh DPR kan, nah kita sudah sampaikan ketika kita rapat pimpinan di DPP partai demokrat, positifnya pemilihan melalui dewan adalah ini-ini dan negatifnya ini-ini, itu sudah kita sampaikan. Dan oleh partai pasti itu disampaikan kepada fraksi di DPR RI, yang pada prinsipnya kita memandang makna demokrasi itu harus luas, bukan berate kalau tidak langsung dengan rakyat, karena sudah dicoba, terbiasa, menjadi tidak demokratis. Sudah itu ya banyak sekali pertimbangannya tadi, efisiensi waktu dan lain sebagainya, sesudah itu menghindari terjadinya gesekan-gesekan dimasyarakat ini kan tidak mudah untuk membangun kembali, perlu waktu yang lama lo terjadi gesekan-gesekan dimasyarakat karena dukung A, dukung B. kalau usulan kita dari DPD waktu itu memang kita mengusulkan dengan berbagai pertimbangan memang sebaiknya untuk gubernur dipilih di DPRD.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Kalau itu polanya masih dipilih langsung, sulit kita. Kemarin saya diskusi dengan teman ketua KPU provinsi, koq tinggi amat. Tapi setelah dia sampaikan ini uraiannya, ini segini, segini, kita paham. Sekarang cetak kertas suara saja kan satunya udah berapa, sementara penduduk

Lampung yang milih misalnya tiga juta misalnya, sudah itu pembentukan lagi sampai ketinggian TPS misalnya, itu kan istilahnya siapa rakyat yang mau menjadi KPPS, menjadi ini tanpa ada honor, kan tidak ada. Nah ini kan tidak bisa kita inikan dan itu yang paling mahal adalah biaya penyelenggara, karena sampai ketinggian bawah itu kan harus terbentuk, sampai dia yang menyiapkan TPS. Biaya per-TPS aja kan rata-rata sewa tenda itu, dan sebagainya itu bisa Rp. 300.000-an, bayangkan kalau di Lampung ini misalnya ada 4000 TPS. Kemudian pilkada serentak juga sebenarnya lebih bagus lebih kecil, tapi kalau kita hitung-hitung sama saja, seperti contoh misalnya tahun 2008 ketika pilgub bebarengan dengan pilkada Lampung Utara, otomatis kan masing-masing kertas suaranya kan berbeda-beda, sudah itu kalau diserentakan demikian anda bayangkan bahwa untuk satu biaya pilkada itu kalau misalnya 500 miliar sudah bisa jadi berapa bangunan, sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya, artinya kan banyak yang terkuras, tapi itulah biaya membangun demokrasi, kita tidak bisa hitung dari sisi itu, tapi disatu sisi memang kalau untuk efiseinsi penyelenggaraan pemilu, itu susah. Ya kalau masyarakat milih langsung kan otomatis dari yang mulai dari kartu pemilih, kertas suara, belum lagi yang rusak, dan sebagainya. Apalagi masyarakat kita sudah terbiasa bahwa dari masyarakat kita kan sudah terbiasa bahwa dengan pilkada langsung ini mereka akan mendapatkan manfaat-manfaat yang spontan dapat inilah, itulah, ada yang ngasih ini lah, itulah, nah ini kalau terus terjadi ini kan bahaya sebetulnya untuk proses pendewasaan demokrasi itu sendiri.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Ya harus dimulai dari calon tersebut, untuk dia tidak “membeli” suara rakyat dengan proses pendekatan yang secara langsung memberikan sesuatu pada masyarakat. Tetapi ini juga dampak yang tidak baik dari proses politik pemilihan langsung, masyarakat kita sudah terbiasa dengan itu. Jadi kalau calon misalkan mengumpulkan orang, terus pulang tidak dikasih ongkos itu aja kan sudah malas, oleh karena itu prosesnya untuk tingkat provinsi dimulai dengan lewat dewan misalnya begitu, itu kan lebih elegan. Tapi kalau untuk mengurangi sistem politik begitu maka yang utama adalah bagaimana jaringan partai ini menggerakkan seluruh struktur dan kadernya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, bahwa nanti akan dibayar oleh kepala daerah yang kita dukung setelah dia jadi dengan program-program pembangunan, hanya didalam beberapa daerah itu kan sulit, seperti contoh ada kebanggaan dari sisi itu, ketika si Faisal Basri calon independent di DKI kemarin, itu betul-betul tidak pakai uang bahkan

timnya sokongan, urunan, tetapi kan perolehan suara dia kan sebenarnya bagus dibandingkan dengan calon dari Golkar. Ini menunjukkan untuk tingkat perkotaan bahwa memilih orang itu dalam proses situ bukan berarti kita dibayar, bukan berarti kita memberikan sesuatu, tetapi kalau kita di daerah sini masih susah. Contoh, saya dalam beberapa Pilkada kemarin, misalnya ada pertemuan apa, saya nyusup ke masyarakat di daerah yang mereka tidak mengenal saya, saya setting coba itu jangan dikasih apa-apalah itu, itu banyak yang ndumel mereka, ah ngapain cuma mendengarkan ini-ini aja, tidak ada, kita sudah ninggalin kerja kita disawahlah, inilah, nah ini problem ini, dan ini sudah sampai ditingkat bawah dan kita sudah lakukan selegan mungkin dan menarik, contoh partai Demokrat di Tulang Bawang, kita minta semua kader-kader kita turun ke masyarakat coba kita tidak pakai dana, kita janjikan saja bahwa nanti akan dibayar oleh calon yang kita usung melalui program-program dari kepentingan mereka, tapi tidak semudah itu, itu persoalannya. Jadi calon juga gengsi, dia jadi omongan nanti. Ini yang terjadi, masyarakat kita sudah terbiasa, jadi sulit memang untuk menurunkan cost politik itu. Oleh karena itu, seperti saya hari ini baca dikoran bahwa Pak Roby bilang calon itu harus kuat tiga, pertama dari faktor politik, kedua sosial, dan ketiga finansial. Misal kita dikenal orang, orang simpati, tapi begitu finansial kita tidak mencukupi untuk kita membuat kantong-kantong suara di daerah, susah juga nantinya. Pembatasan biaya kampanye juga tidak efektif, karena kenyataannya begini, coba di KPU itu, biaya kampanye, kalau calon kan kemudian buka rekening, biaya kampanye kan sudah ada pembatasannya, misalnya untuk lembaga sepuluh juta, tapi secara logika saja disitu biaya kampanye cuma dua miliar, bohong itu, kalau dia Pilkada Gubernur Lampung yang 14 kabupaten/kota, sekarang misalnya cetak kaos, kaos paling murah tujuh ribu, artinya sudah berapa, kan tujuh juta dia harus cetak, tujuh juta kali sepuluh ribu misalnya, sudah berapa itu, baru kaos. Jadi memang sangat tinggi cost politiknya itu, belum lagi banner-banner, sepanjang jalan, banner kan rata-rata lima belas ribu satu buahnya, dia tidak cukup untuk di Bandar Lampung cuma dua ribu misalnya, minimal sepuluh ribu. Kalau tentang batasan-batasan biaya kampanye sebenarnya sudah ada undang-undangnya, bahwa untuk calon biaya kampanye harus transparan, tapi kalau kita lihat biaya kampanye saya misalnya dua miliar, kana apa iya, sementara baliho, banner, kaos saya ada dimana-mana, orang kan sudah menghitung. Kemudian yang pelan-pelan harus kita benahi bersama adalah terutama pandangan masyarakat kita dibawah, bahwa Pilkada ini jangan menjadi ajang mereka untuk mendapatkan pendapatan. Yang terjadi hari kan sudah demikian. Mungkin kalau untuk masyarakat perkotaan seperti Bandar Lampung si mudah-mudahan tidak begitu. Jadi dalam kondisi Pilkada langsung sulit kita untuk menurunkan itu. Pokonya kalau untuk Lampung sulit untuk calon independent yang

betul-betul tidak punya uang, yang betul-betul tidak mau keluar uang untuk membeli suara, akan jadi itu sulit. Kan kalau calon itu bagaimana orang sudah meluangkan waktu, tetapi dia tidak rugi, harus ada nilai lebihnya, nilai lebih apakah secara financial ataukah mungkin sarung, sembako, dll. Karena yang saya pelajari pada pilkada tiga kabupaten kemarin yang baru berlangsung, itu mayoritas masyarakat itu inginnya langsung, jadi kita datang bawa sembako misalnya, itu mereka langsung merasakan, tapi kalau kita Cuma janji-janji saja susah. Nah ini yang namanya dinamika dimasyarakat ini yang juga harus menjadi pertimbangan seseorang yang sedang kampanye atau mencalonkan diri. Makanya kalau saya melihat, meskipun belum saya sampaikan kepada teman-teman, untuk calon gubernur Lampung kalau dia cuman punya uang pribadi misalnya dua ratus miliar dia pasti berhitung, karena gak cukup itu, kalau dibagi 14 kabupaten/kota.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Tidak, kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun pijakan-pijakan demokrasi, ketika itu banyak mudharatnya keimbang manfaatnya sesuatu yang wajar-wajar saja kalau kita lakukan perbaikan-perbaikan, jadi bukan suatu kemunduran, karena dengan parameter-parameter yang jelas. Seperti contoh, menjelang pilgub, yang kita tau kan ini orang-orang yang kita tahu ketokohnya dan punya uang, banyak mungkin tokoh-tokoh lain yang mungkin punya kewibawaan, punya kemampuan, tetapi mungkin karena mereka tidak punya uang mereka tidak mau memunculkan diri, kan sudah ngukur duluan, contoh begitu, nah itu-itu yang harus di evaluasi. Jadi tidak bisa ini dikatakan sebagai kemunduran demokrasi, justru ini dalam rangka penguatan membangun demokrasi kita yang sebenarnya baru sejak reformasi ini, artinya baru dari 1999 kan, nah inikan butuh bersesuaian, Amerika saja butuh waktu yang panjang kan untuk punya pakem demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah atau presidennya. Sekarang gini, kenapa koq sekarang sistemnya harus dirubah, karena kesadaran politik masyarakat kita kan masih rendah, kalau kesadaran politiknya sudah diliat semata-mata dari figur dan kita meyakini kan berbeda. Makanya sistemnya, polanya yang perlu kita rubah.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Aturan partai kita adalah, setiap anggota DPRD atau fraksi kita akan mengambil kebijakan apapun, wajib berkoordinasi kepada DPD. Maksimal satu bulan sekali, fraksi harus memberikan laporan tertulis kepada DPD terkait dengan berbagai kegiatan dewan, disitu kita kontrol. Jadi kebijakan fraksi Demokrat, sepengetahuan DPD.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur?

Jawab: Bahwa kita memprioritaskan kader internal iya, tetapi nanti kita punya pola ada tim 9, tim 9 itu bertugas menjaring, menyaring, dan mengusulkan bakal calon yang nanti kalau gubernur akan ditetapkan oleh majlis tinggi yang dipimpin oleh bapak SBY, nah itu salah satu parameter yang harus menjadi ukuran adalah bagaimana hasil survey. Kalau kader kita memang hasil surveinya tinggi, tentu saja akan kita usung kader, tapi kalau hasil survey kita jelek, peluang menangnya jauh maka kita akan pilih orang lain yang itu punya komitmen politik dengan partai. Kalau berbicara, temen-temen dari para DPC dan para kader sampai pada ditingkat kecamatan, kita sepakat mengusung ketua DPD, Ridho Ficardo untuk maju pada pilgub nanti, itu sudah sepakat. Tapi kan kita harus mengikuti aturan partai, tentu kalau nanti dipilih oleh anggota DPRD tentu itu kan akan beda.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Sudah pasti itu, dan walaupun kita suara terbanyak disitu, pasti kita akan gandeng partai-partai lain, untuk berkoalisi pada kita. Politik kan kompromi-kompromi.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Sanksi, karena sebagai kader partai dia harus taat dan patuh menjalankan seluruh perintah partai, ketika itu mbalelo, ya jelas kena sanksi, bisa diberhentikan sebagai kader, otomatis kan bisa kita copot dia atau PAW prosesnya seperti itu.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Drs. Hi. Tulus Purnomo.
Asal Partai Politik : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Jabatan : Wakil Ketua DPD PDIP Lampung / Ketua Fraksi PDIP
DPRD Lampung
Alamat Kantor : Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jl. WR. Monginsidi
No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung 35215
Alamat Rumah : Bandar Lampung.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Jawa
Pendidikan Terakhir : S1
No Tlp / HP : 0811797618
Waktu Wawancara : Jumat, 17 Oktober 2012 / Pukul 09. 05 - 09. 40 WIB
Tempat Wawancara : Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung



(Proses wawancara dengan Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung /
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: Bagi PDIP Perjuangan terutama di daerah ini karena akan ikut keputusan politik di DPR. Sekarang kan sedang berkembang wacana pembahasan RUU Pilkada itu untuk gubernur akan dipilih oleh DPRD, pemilihan dengan keterwakilan, tidak secara langsung oleh masyarakat. Nah kalau sikap partai kami disana menginginkan pemilihan tetap langsung oleh rakyat, karena memang sekarang ini eranya sudah era pemilihan langsung semua, tidak ada lagi yang dipilih melalui sistem perwakilan. Hanya saja kalau ada kekurangan-kekurangan dipemilihan langsung, misalnya bagaimana tentang transparansi penggunaan uang, kemudian penyalahgunaan kewenangan kekuasaan, itu yang harus dicarikan solusi agar setidaknya-tidaknya penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang itu tidak berkembang di pemilihan langsung itu jadi lebih pada kualitas dan kapasitas seorang pemimpinnya.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Jadi begini, puluhan atau ratusan miliar itu digunakan untuk membangun demokratisasi, tetapi satu sisi satu-satunya alat yang paling efektif untuk menyatukan semua komponen bangsa ini ya melalui pemilu. Jadi walaupun kelihatannya mahal, tetapi ini menjaga integritas berbangsa dan bernegara, kalau tidak ada yang namanya demokrasi ya mungkin Indonesia ini nanti lama-lama akan kesulitan untuk menjaga aspirasi dari para warganya. Kemudian menjadi persoalan juga untuk kedepannya. Oleh karena itu karena alat demokrasi ini menjadi pemersatu juga nantinya maka demokrasi yang substansial itu yang dicari di Indonesia, demokrasi yang betul-betul hanya menjadi alat bai kesejahteraan rakyat, bukan demokrasi yang menjadi tujuan, sekedar pemilihan, sekedar memilih pemimpin, dan selesai disitu tapi tidak substansi mengapa kita memilih pemimpin, dengan sistem apa kita memilih pemimpin, itu masalahnya.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Itu kan soal tabiat orang, kalau mau korupsi mah tidak perlu melalui pilkada dan buktinya yang tidak ikut pilkada juga banyak yang tersangkut kasus korupsi. Tapi persoalan cost politik dengan money

politic itu yang berbeda. Kalau orang datang belakangan untuk sekedar menjadi pemimpin itu maka dia akan membayar orang yang mau memulih dia, tapi kan kalau dimulai dengan membeli dengan cara yang seperti itu ya rakyatnya juga yang harus cerdas. Dan itu sudah ada contoh seperti di DKI Jakarta, berapa duit pun tidak masalah, tidak lakulah, karena rakyat lebih berharap pemimpinnya itu mampu mencarikan solusi bagi problem-problem mereka. Kalau itu bisa jadi efek bagus bagi beberapa daerah, saya kira nanti kedepan yang namanya money politic lambat laun akan berkurang. Dan yang cost politik itu betul-betul sangat minimal, ongkos politik itu hanya dipakai untuk hal-hal yang sangat prinsip, misalnya untuk membiayai perjalanan, kan tidak mungkin tidak mau pakai bensin, tidak untuk membayar rakyat agar dia memilih.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab: Ya masalah ini adalah soal desain pemerintahan, yaitu urusannya efektifitas dan efisiensi. Lalu kemudian tentang pelayanan. Karena pemerintah itu didirikan adalah untuk melayani. Ya persoalan titik tekan otonomi daerah itu bukan diprovinsi, itu ya betul, karena kewenangan provinsi hanya dapat memberikan setidak-tidaknya teguran, kalau misalnya bupati/walikota dalam proses administrasidan kebijakan menyimpang dan sebagainya itu harus dikasih sama pemerintah provinsi, sehingga dia tidak akan menjadi arogan. Koridor-koridor itu yang seharusnya diciptakan melalui peraturan perundang-undangan. Jadi intinya otonomi daerah itu adalah mendekatkan pelayanan masyarakat kepada pelayannya. Kemudian dengan pelayanan yang maksimal itu akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dimana mestinya otonominya, ya mestinya di daerah karena yang paling dekat dan otonomi itu harus dimaknai sebagai sebuah peluang untuk masyarakat dan pemerintahannya kemudian untuk berpartisipasi didalam proses pembangunan, dalam proses menciptakan kesejahteraan bersama. Kalau sekarang ada kelemahan-kelemahan itu kan soal bagaimana sistem yang dibangun kemudian dievaluasi dan kemudian ada koridor-koridor baru untuk mengaktifkan koordinasi. Dan alasan titik tekan otonomi daerah tersebut terhadap pemilihan gubernur harus dipilih oleh DPRD Provinsi, itu menurut saya sangat formal dan administratif sifatnya. Pemerintahan ini kan harus dimaknai bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Kalau ada system yang dibangun bukan melauai sistem yang dipilih oleh rakyat, walaupun DPRD adalah representasi dari rakyat, tapi kan persoalannya apa betul apa yang dikehendaki oleh DPRD sama dan sebgun dengan yang dikendaki oleh

rakyat. Karena pada akhirnya pertanggungjawabannya itu kepada rakyat. Cobalah saya mau memilih si A, apakah yang milih saya kemarin itu juga akan memilih si A, kan tidak, inilah yang namanya penyimpangan. Nah kalau dipilih langsung kan jelas rakyat yang menghendaki, jadi legitimasi kepemimpinannya kuat. Dengan legitimasi yang kuat diharapkan, itu akan efektif memegang kekuasaan dan pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi dalam konteks ini harus ada kekuasaan yang dilimpahkan kepada gubernur dari pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi, monitoring yang efektif kepada bupati/walikota, tetapi itu juga tidak boleh sewenang-wenang karena itu harus dipayungi oleh aturan. Nah apa saja parameter, atau indikator bupati/walikota itu ikut didalam mainstream bersama untuk melayani masyarakat, itu yang harus dibuat, dipayungi dalam UU misalnya UU Pemda, kan ini yang belum ada regulasinya. Bupati/walikota ini kan hasil pemilihan rakyat langsung, tetap ada rambu-rambunya dan ada kewenangan-kewenangan yang boleh dan tidak boleh, itu yang belum diatur. Jadi kalau diatur tidak akan sewenang-wenang, karena anggaran kabupaten/kota juga kan tidak sepenuhnya mandiri, sebagian besar juga berasal dari DAU dan DAK yang dilimpahkan pemerintah pusat, kalau itu dilimpahkan kepada gubernur untuk ikut didalam mengalokasikan dan sebagainya, nanti pemerintah kabupaten/kota juga akan ikut. Itu salah satu solusinya selain harus disadari bahwa tidak ada kekuasaan yang absolute dalam memerintah. Nanti pada saatnya orang tidak akan pernah bersikap arogan kalau dia merasa bahwa tugas-tugas rakyat lebih penting ketimbang urusan pribadi dan kelompoknya.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Ya demokratis, karena juga dipilih, tapi yang namanya demokrasi kan kalau dikembalikan ke langkah awalnya, definisi awalnya adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kalau itu dijalankan oleh wakilnya, sekarang apakah wakil-wakilnya segaris dan sebangun dengan aspirasi rakyat setelah dia dipilih beberapa tahun yang lalu. Apakah pilihan saya memilih gubernur itu juga pilihan rakyat, kan belum tentu, jaminannya apa, jadi tidak aspiratif. Oleh karena itu dipilih melalui DPRD ya demokratis, tetapi derajat demokratisnya itu masih dibawah kalau dipilih rakyat secara langsung.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Ya tergantung tadi, tujuannya memilih gubernur apa, kalau mau memperkaya diri sendiri atau memperkaya kelompoknya. Karena itu proses dan recruitment tahapan pemilihan gubernur itu harus transparan,

demokratis, jadi alasan dipilih kenapa kan harus jelas. Kalau dipilih karena mau kantongnya ya iyalah, asumsi itu menjadi benar. Praktik itu sangat memungkinkan, namanya proses politik kan pasti akan terjadi, tetapi kalau itu diawasi dan prosesnya transparan, demokratis, dan misalnya yang terpilih betul-betul orang yang track recordnya bagus, bersih pasti akan terbantahkan.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?

Jawab: Ya DPRD kan bagian dari pemerintahan daerah, lalu karena sistem rekrutmentnya yang begitu akan menimbulkan praktik-praktik yang tidak bagus. Tetapi kalau dia mewakili kepentingan rakyat dan sebagainya ya itu tercermin dari bagaimana tugas-tugas dan fungsi dia di legislatif yaitu bagaimana hak bugeting dijalankan, melalui perda-perda yang dibuat itu sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bagaimana kontrol penyelenggaraan atau pelaksanaan perda-perda itu dijalankan. Saya kira kan tidak otomatis kalau dipilih suara terbanyak lalu seseorang tidak akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah. Jadi itu juga kembali lagi pada bagaimana masing-masing partai yang menugaskan kadernya disini untuk mengevaluasi, membina, karena kan ada juga misi partai juga yang ingin dicapai.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: Ya sampai hari ini PDIP masih menolak wacana tersebut, kita tetap menginginkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan argument-argumen yang telah saya sampaikan tadi.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Jadi untuk itu kita punya usulan solusi untuk itu, supaya pemilihan itu dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan kabupaten/kota, atau bersamaan dengan pemilihan presiden. Jadi ada dua tahapan pemilu, yaitu pemilu presiden dan eksekutif dalam pengertian sampai bupati/walikota dan pemilihan legislatif. Jadi satu kesatuan dengan sistem pemilu yang dibangun ditingkat nasional. Sehingga nanti kabupaten/kota dan provinsi itu akan sharing untuk mengurangi besarnya biaya pemilihan, jadi kalau ditanggung bersama-sama kan lebih murah, nanti tinggal kabupaten mengurus apanya, provinsi itu bagiannya apa.

Itu usulan yang kami sampaikan kepada partai kami di pusat. Sehingga nanti kedepan, seperti di Aceh ini kan sudah dimulai dan bisa dijadikan contoh juga pemilihan gubernur bersamaan dengan pemilihan bupati/walikota di beberapa tempat, dan hanya menyisahkan empat kabupaten/kota yang belum ikut dalam pemilihan serentak itu, dan itu bisa. Dengan cara itulah nanti barangkali efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran bisa ditekan.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Ya semua bisa dikompensasi tidak harus dengan uang, dengan kerja keras misalnya. Kalau rakyat percaya bahwa pemimpinnya itu bisa menjadi memberikan jalan keluar bagi problem yang sedang dihadapi, itu tidak akan dibayar, rakyat akan bersedia, akan bergotong royong, sum-suman, untuk membiayai cita-cita bersama. Tapi itu butuh namanya kesadaran, untuk menggunakan hak dan kewajibannya dan kesadaran itu dibangun dengan proses pendidikan, yaitu makanya salah satu fungsi partai politik itu memberikan edukasi kepada rakyat untuk memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan etika dan moralitas. Itu yang paling penting esensi daripada berpolitik semestinya dan menjadi pijakan bagi semua politisi. Kalau dia ingin berbuat bagi rakyat itu, tidak mengedepankan kekuasaan, jabatannya, dan tidak mengedepankan besarnya duit, tetapi lebih mengedepankan apa yang harus diperbuat bersama-sama mereka. Kalau dibangun bersama-sama ya otomatis, uang itu dengan sendirinya tidak akan menjadi panglima dalam proses pemilu. Tetapi ya butuh itu, kesadaran yang dibangun melalui proses pendidikan politik, kesadaran berbangsa dan bernegara, menjaga eksistensi, lalu koridornya adalah etika dan moralitas.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Ya tidak mundur juga lah, ini kan bagian dari evaluasi tentang bagaimana perkembangan demokratisasi di negara kita, ini juga kan masih sebatas wacana dan masih dalam proses penggodokan, apakah itu nanti yang akan terjadi kan tidak tahu, karena masih ada dua fraksi di DPR RI yang belum setuju dipilih oleh DPRD, yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi PKS. Tapi ya nanti kita liat saja hasil UU, dan pasti nanti juga akan di MK-kan.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Yang namanya anggota DPRD itu petugas partai di lembaga legislatif, jadi dia adalah organ pelaksana tugas partai. Jadi kontrol, di evaluasi, diarahkan oleh partai. Oleh karena itu ketua fraksi partai di DPRD itu harus pengurus struktur partai, dan kemudian dia melaporkan apa perkembangan, kemudian juga meminta apa keputusan dan arahan dari partai ketika dia akan mengambil keputusan-keputusan strategis di legislatif.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur?

Jawab: Ini kan soal game saja, jadi kita mencalonkan gubernur tentu ada indikator-indikator, kriteria-kriteria, yang paling penting adalah kriteria berpihak kepada rakyat, memiliki track record yang baik, jujur, bersih, teruji dalam proses politik, jadi kita tidak bicara kader non-kader, karena kita mencari pemimpin untuk rakyat bukan pemimpin untuk partai.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Oh iya lah kalau itu terjadi, seperti tadi saya sebutkan yang namanya anggota DPRD itu kan petugas atau pelaksana organ partai di legislatif. Jadi dia bukan siapa-siapa, bukan pengambil kebijakan, dia tidak boleh menentukan pilihannya sesuai dengan kemaunnya sendiri, dia menentukan pilihannya itu karena arahan partai. Itu garisnya jelas, garis komando, garis perintah.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Oh ya dipecat, dan kita sudah berkali-kali memecat orang. Jadi meskipun anggota DPRD dipilih melalui suara terbanyak, kemudian disini partai dan rakyat itu satu nafas perjuangan yang sama, dan partai itu memperjuangkan kepentingan rakyat, lalu dia kemudian punya petugas-petugas di DPRD, di eksekutif. Jadi bukan saling berhadapan partai dan rakyat itu, jadi partai itu cita-citanya didirikan untuk kepentingan rakyat yang diamanatkan dalam UUD 1945, jadi satu bangun dia, satu garis, satu nafas perjuangan, jadi tidak ada masalah. Dan memang sistem yang disepakati di Indonesia adalah sistem demokrasi yang seperti ini, jadi partai mengambil peran yang sangat penting proses ini.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Ismet Roni, S.H.
Asal Partai Politik : Partai Golongan Karya (Golkar)
Jabatan : Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung
Alamat Kantor : Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jl. WR. Monginsidi
No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung 35215
Alamat Rumah : Jl. Pulau Karimun Jawa, Sukarame, Bandar Lampung.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : -
Pendidikan Terakhir : S1 / Ilmu Hukum
No Tlp / HP : 081584614988
Waktu Wawancara : Senin, 08 Oktober 2012 / 11. 05 – 11. 30 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung



(Befoto setelah melakukan wawancara dengan Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: Jadi gini, pilkada langsung ini kan nafas dari reformasi, nafas dari reformasi yang dicanangkan pada waktu itu kemudian sudah berjalan lebih dari tahun 1999 yang sudah dimulai, artinya dalam rentang waktu 13 tahun tersebut, ternyata hasil penelitian, hasil kajian dari kementerian dalam negeri itu mengatakan bahwa pilkada langsung tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini lah ya katakanlah, dikarenakan pertama terlampaui mengeluarkan cost yang tinggi. Yang kedua, terjadi konflik horizontal di masyarakat. Nah saya yang mengikuti selama ini dipartai, itu sangat merasakan, jadi sebenarnya saya mendukung apa yang disampaikan oleh kementerian dalam negeri kepada DPR RI untuk mengembalikan pemilihan gubernur kepada DPRD. Kenapa? Pertama untuk mengurangi biaya pilkada itu sendiri. Kemudian dan juga untuk mengurangi terjadinya konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu saya berfikir melihat kondisi saat ini, ya saya sebaiknya dikembalikan lagi lah dengan tidak mengurangi rasa demokrasi kita, DPRD juga toh adalah wakil rakyat, kami ini kan duduk atas nama rakyat, sama aja dengan rakyat, jadi saya sependapat apa yang disampaikan kementerian dalam negeri, tapi ini kan masih wacana, usulan yang belum tentu disahkan oleh DPR.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Mahal, orang saya yang sudah merasakan di pilkada tulang bawang kalah, orang tidak pakai duit, kalau pakai duit menang. Sama juga mahal, berapa miliar itu dana yang dipakai oleh KPU untuk penyelenggaraan pilkada. Belum lagi konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi saya merasakan betul bahwa kalau dikatakan mahal, memang mahal. Hebatnya lagi manusia sekarang mah, begitu menyikapi pilkada, “wani piro”? Itu kan rusak mental kita sekarang, mental anak bangsa ini sekarang sudah rusak, akhirnya apa, pemimpin yang terpilih itu berpikir harus membayar utang, karena dia tidak mungkin pakai duit dia sendiri, dari mana dia duit sebanyak itu untuk ikut pilkada, untuk setiap satu kepala bahkan kemarin ada yang mengatakan 100 sampai 300 ribu, dari mana coba itu calon dapat uang untuk membeli suara itu.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Asli, kalau anda baca di rakyat merdeka, pernyataannya salah satu komisioner KPK, pak Busro Muqoddas, itu banyaknya kepala pemerintahan yang terjerat kasus korupsi atau kasus hukum, itu salah satunya pernah atau akibat dari pilkada yang menggunakan uang dan mahal, karena dibalik itu ada cukong-cukong pilkada, jadi ada cukong-cukong pilkada yang membiayai. Tidak usah jauh-jauhlah, anda tau Satono itu, tertangkap karena dia apa, karena dia menaruh dana APBD di Bank Tripanca, kenapa mungkin karena komitmen pada saat pilkada itu dia dibantu oleh Alay. Saya berani buka ini, karena ini fakta ini.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limphan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab: Ya jelas donk, kalau otonomi daerah memang adanya di kabupaten/kota, kalau pemerintah provinsi ini adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah, dia sebagai koordinator pemerintahan yang ada di daerah, jelas mah kalau itu undang-undang yang mengatakan.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Ya demokrasi donk, orang DPR adalah wakil rakyat, siapa yang mengurangi nilai-nilai demokrasi, kan kita duduk disini wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, mewakili rakyat. Dimana kalau itu dikatakan tidak atau mengurangi demokrasi.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Tapi begini, dampak psikologisnya didalam masyarakat, kalau itu langsung itu kan semua masyarakat yang terkena imbasnya, mental kita. Tetapi kalau itu dilakukan oleh DPRD hanya 75 orang yang mentalnya rusak kalau katanya seperti itu, tapi kan tidak semua masyarakat cerdas, sekarang pilkada langsung kita kan rusak. Coba anda cek di lapangan, tanya kepada masyarakat, kemarin dapat berapa waktu milih si A milih si B. beban mental masyarakat yang terlalu berat.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?

Jawab: Lah iya, itu yang saya katakan tadi, bahwa anggota DPRD ini kan mewakili rakyat dari daerah pemilihannya, dia dipilih langsung pada pemilu waktu itu melalui suara terbanyak, jadi saya kira anggota DPRD ini betul-betul punya tanggung jawab yang penuh terhadap masyarakat.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: Prinsipnya kalau kita, terutama saya pribadi menyetujui itu dikembalikan kepada DPRD, tapi kalau yang ditanya bagaimana sikap partai ya kan ada mekanismenya, harus diputuskan melalui rapat, karena kita belum membahas itu, karena itu juga yang mengusulkan ke pusat. Tapi kalau saya secara pribadi, kembalikanlah mekanisme demokrasi kepada DPRD, terutama untuk menghindari terjadinya konflik di masyarakat, kemudian untuk menghindari cost atau biaya yang tinggi dalam pilkada itu.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Ya sekarang solusinya begini, kalau dia mau dipilih oleh DPRD, siapa bilang mengeluarkan biaya yang besar, tapi kalau, coba anda buktikan berapa biaya kalau dipilih oleh anggota DPRD. Tapi kalau dipilih langsung oleh masyarakat, tau gak, buat banner aja sudah berapa itu, belum lagi kita harus menyambangi kabupaten/kota. Tapi kalau di DPRD, tinggal track record aja mah DPRD lihat, kalau calon track record-nya baik, punya komitmen baik, dan visi-misi baik. Kemudian kalau persoalan pilkada serentak, sepanjang itu aturannya ada ya tidak masalah, kenapa tidak, tidak menjadi persoalan, malah itu juga menekan biaya koq itu.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Integritas calon kepala daerah. Karena, kalau soal biaya politik pasti semua ada biayanya lah, tidak mungkin tidak ada biayanya. Nah kalau yang dimaksud oleh pak Mendagri itu banyak tersangkut kasus korupsi, karena dia kepala daerah sebagai ketua partai mungkin, atau karena dia punya komitmen dan beban dengan partai politik mungkin. Karena yang namanya politik pasti ada biaya, cost politik itu jelas ada. Kalau ada pembatasan biaya kampanye itu tergantung setiap partai, itu relatif.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Tidak setuju saya, darimana mundurnya. Saya kira tidak, karena setiap kegiatan kan harus ada evaluasi, dari mana mundurnya, anggota DPRD ini kan satu orang mewakili 14 ribu lho, saya kira tidak mundur, justru ini adalah untuk menghindari konflik dimana-mana, setiap pilkada konflik diseluruh nusantara ini. Mungkin Kemendagri tau itu.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Kalau kita diatur dalam peraturan organisasi itu, hubungan partai terhadap fraksi, hubungan partai pada anggota DPRD, kita ada diatur oleh peraturan organisasi. Jadi anggota fraksi partai Golkar itu adalah perpanjangan tangan dari apa yang ada di DPRD, harus patuh dan tunduk pada partai.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur?

Jawab: Pasti, tetapi untuk menentukan siapa orangnya, kita punya mekanisme tersendiri untuk itu. Sementara kalau aspirasi dari DPD Kabupaten/Kota se Lampung dan jajaran DPD provinsi, kita sudah sepakat untuk memajukan kembali ketua DPD provinsi, yaitu Bang Alzier Danies Thabrani. Tetapi itu tergantung dari pusat nanti siapa yang mau diusung, intinya kalau bawah mengendaki itu.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Pasti.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Kalau tidak memilih calon yang diusung oleh partai kita pecat, pasti kita pecat dan di PAW.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Drs. Hi. Gufron Azis Fuadi.
Asal Partai Politik : Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Jabatan : Ketua Umum DPW PKS Lampung
Alamat Kantor : Jl. WR. Monginsidi No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung 35215
Alamat Rumah : Jl. Bay Pass 2.A, No. 16, Rajabasa Raya, Bandar Lampung.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Jawa
Pendidikan Terakhir : S1
No Tlp / HP : 08127950607
Waktu Wawancara : Kamis, 04 Oktober 2012 / 16. 00 – 16. 32 WIB
Tempat Wawancara : Kantor DPW PKS Lampung



(Proses wawancara dengan Ketua Umum DPW PKS Provinsi Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: Saya lebih cenderung tetap dipilih oleh rakyat, kenapa, karena itu demokrasinya lebih berjalan atau lebih demokratis, kemudian kepala daerah juga lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Adapun masalah biayanya yang besar, itu mungkin bisa saya cenderung lebih apa yang disebut dengan pemilihan kepala daerah secara bersama/serentak. Ya memang saat ini pemerintah atau kemendagri memang mengajukan draf usulan ke DPR RI yang intinya gubernur dipilih oleh anggota DPRD. Alasannya pertama, bahwa pilkada itu bukan pemilu, tetapi pilkada atau pemilihan kepala daerah bukan pemilihan umum kepala daerah. Makanya ada yang menyebut pilkada ada yang pemilukada. Kalau pemilukada berarti dia masuk dalam regim pemilu, kalau pilkada berarti dia bukan pemilihan umum. Karena bukan pemilihan umum, maka boleh dipilih oleh rakyat dan boleh dipilih DPRD. Yang kedua alasan yang lebih sering diucapkan adalah masalah besarnya biaya, Kemudian yang ketiga mengingat peran bahwa gubernur terkait dengan otonomi daerah, maka gubernurpun lebih condong atau lebih besar posisinya sebagai wakil pemerintah pusat dibanding sebagai kepala daerah. Berbeda dengan bupati/walikota dimana otonominya lebih besar dibanding dengan provinsi. Itulah alasan yang saya ketahui dari pemerintah.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Ya terkait biaya kalau dipilih langsung itu memang biayanya lebih besar, contoh sekarang ini aja KPU untuk pilkada gubernur 2013 mengajukan anggaran tidak kurang dari Rp. 200 Miliar. Tetapi ya menurut saya tidak masalah kalau itu digunakan untuk membangun demokrasi, dan persoalan itu sebenarnya bukan masalah yang paling krusial, karena itu bisa dicarikan jalan keluarnya, tidak harus kemudian dikembalikan lagi dipilih oleh DPRD.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Ya terkait dengan biaya politik itu sebenarnya begini, waktu periode pertama, pertama kali diadakan pemilihan kepala daerah secara langsung, itu money politiknya itu ada tapi tidak besar, nah kalau saya si cenderung pada, pertama adalah penegakan hukum, kalau memang dia

melanggar hukum waktu pemilu ya benar-benar donk. Selama ini kan hampir tidak ada kepala daerah yang terbukti melakukan money politic, misalnya kemudian dibatalkan atau digugurkan. Banci itu peraturan-peraturan. Nah kalau mau diterapkan hukum, sehingga memiliki efek jera. Yang kedua, pendidikan politik kepada masyarakat harus tetap berjalan, kalau selama ini kan tidak berjalan. Sekarang orang berpikir, buat apa saya berbicara mengenai visi-misi, yang penting saya kasih uang kepada rakyat. Yang ketiga, disini juga peran media harus membantu negara ini memberikan pendidikan politik yang bagus. Media ini kan seperti beramata gunung ini sekarang, berdiri diatas dua kaki. Satu sisi bilang calon itu harus bagus dan bersih, tapi sisilannya kan dia itu nerima duit untuk iklan tidak pilih-pilih kan, yang penting dia akan mengiklankan siapa yang bayar. Harusnya ini kan bisnis ya bisnis, tapi jangan satu sisi dia bilang harus ideal, tapi dia sendiri tidak ideal, kan gitu. Saya rasa tiga hal ini harus kita clear kan. Saya yakin bisa, pada saatnya nanti masyarakat itu akan sadar, bahwa kalau mereka terus transaksional dengan calon-calon kepala daerah mereka akan mendapatkan akibat yang sangat buruk selama lima tahun. Ya kalau selama lima tahun diulangi lagi, akan lebih buruk lagi. Ada satu titik tertentu dia akan jenuh dan dia akan sadar. Memang demokrasi itu butuh proses, kalau punggawa-punggawanya seperti menteri, pemerintah, parpol, kemudian pilar ke empat. Yang ngaku pilar ke empat siapa? Pers kan, gak ikut membangun demokrasi ya sama saja, tetap akan lama. Proses akan demokrasi akan cepat tercapai apabila pilar satu, pilar kedua sampai pilar ke empat media mau, coba sekarang gini, media masaa itu kan tau, mana sih calon-calon terutama incumbent yang duitnya kemana-mana, itu tau sebenarnya. Cuma karena duit, ya gitu. Saya punya pengalaman disini, kita pernah melaporkan kepada wartawan bawahan, gak pernah tembus, kata wartawannya, pak ini kita sudah buat beritanya, cuma mandeg di redaksi. Coba kamu ke redaksi, bawa ini semua data-datanya, pasti diterima, besok pagi kawan kita itu datang kerumah bupatinya, ada redaktur itu ternyata membawa berkas yang kita bawa, melapor dia, ada transaksi kan dia. Jadi semua pihak jangan putus asa, baru berjalan duakali periode pilkada sudah putus asa. Yang penting itu tegakan hukum, membangun pendidikan politik oleh semua pihak. Baik itu pemerintah, parpol, calon, juga media massa, jangan media massa mau seenaknya sendiri, nuduh sana-sini tapi dia tidak mau perlakukan seperti itu.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab: Jadi begini, alasan itu bisa dibuat, ada alasan bahwa pemerintahan provinsi banyak mengerjakan tugas-tugas pemerintah pusat, iya juga iya. Kemudian alasan bahwa otonomi daerah itu status dan fasilitasnya ada dikabupaten/kota sehingga mereka tidak bisa dikoordinasikan itu juga iya. Tetapi itu bisa disiasati, kan tergantung undang-undangnya kan, tergantung peraturannya, regulasinya mengatur seperti apa. Kalau regulasinya mengatur bahwa bupati/walikota bisa berjalan sendiri tanpa harus ada gubernur kan tidak ada salahnya. Tapi kan dibuat aturan kan bisa. Bahwa katanya gubernur itu banyak mengerjakan tugas-tugas pemerintah pusat ya gak juga, iya ada, tapi bukan berarti kemudian tidak ada tugas daerah. Coba kita liat kerja gubernur, kan kerja gubernur itu tercermin dari APBD, nah sekarang kita liat saja, APBD itu diliat dari sisi PAD, cukup berimbang PAD sama dana bantuan pusat, itu cukup berimbang. Karena kita sudah menganut sistem negara kesatuan, ya harus gitu, kalau menuntut gubernur harus punya kewenangan yang besar, ya buat saja negara federal.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Bisa juga demokratis, karena demokrasi itu di UUD itu kan tidak menjelaskan bahwa gubernur itu harus dipilih oleh rakyat, hanya dipilih secara demokratis. Artinya bisa dipilih melalui langsung atau oleh perwakilan. Jadi dipilih anggota DPRD pun tetap demokratis, cuman lebih demokratis dipilih oleh rakyat.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Sama saja, selama hukum tidak ditegakan, akan tetap begitu-begitu saja, hal itu akan tetap terjadi. Makanya hukum tegakan, jadi mau dirakyat atau di dewan, jadi kalau hukum ditegakan enak. Saya merasakan koq, saya pernah ikut pilkada yang pertama tahun 2005, tidak pake uang sama sekali, cuman pas ditimpah uang aja. Cuman masyarakat mau, diajak baik mau, tetapi kalau ada orang yang tidak baik, ya hasilnya tidak bagus.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?

Jawab: Sebenarnya begini, saya merasakan dua kali periode ya, justru saya melihat anggota DPR/DPRD berdasarkan suara terbanyak, tidak lebih bagus dibanding DPR dipilih dengan sistem no urut. Kenapa, pemilu itu pesertanya orang atau partai? Partai kan? Karena pemilu itu adalah pesertanya partai, maka seharusnya partailah yang punya hak untuk

menempatkan siapa orang-orangnya. Karena yang diverifikasi nanti kan partai kan, bukan orang. Kemudian yang kedua, kalau ditentukan oleh partai, maka partai akan memberikan kader terbaik untuk menjadi anggota dewan. Kalau sekarang tidak, orang yang kerja mati-matian, rutin mengurus partai, duitnya untuk partai, kemudian orang yang punya duit, orang yang tidak mempunyai kualitas dan loyalitas terhadap partai tiba-tiba masuk. Nah dari situlah, saya merasakan kualitas anggota DPRD itu masih kalah kalau dibandingkan dengan anggota DPRD masa 2004. Loyalitas terhadap partai juga lebih loyal. Nah sekarang tidak, karena merasa kita dipilih oleh rakyat koq bukan dipilih oleh partai. Kalau sekarang partai juga tidak bisa terlalu bertanggung jawab, sudah dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan pengurus partai, kemudian meng-PAW-kan juga lebih susah, maka oleh sebab itu lebih baik dipilih oleh partai, sehingga kita bisa bertanggung jawab, bahwa kemudian nanti partainya gini dan gitu ya tidak usah dipilih lagi untuk pemilu yang akan datang, kan gitu. Ya makanya juga udah tau salah masih aja dipilih, itu karena ada yang bayar.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: Kita itu sikap partai tidak masalah, mau pemilihan langsung oleh rakyat itu lebih bagus, tapi dipilih DPRD ya gak apa, karena itu tidak melanggar aturan. Makanya tadi saya katakan diawal, bahwa dipilih rakyat itu demokratis, dipilih anggota DPRD ya tetap demokratis. Karena demokrasi kita kan bisa demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Apalagi kalau kamu inget pancasila kan, sila ke empat, permusyawaratan perwakilan. Artinya setiap perwakilan kita tidak melanggar aturan, karena patokan kita adalah pancasila. Jadi jangan pula misalnya orang-orang kampus, wah ini kalau dipilih anggota DPRD tidak demokratis, salah. Karena pancasila begitu mengaturnya.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Solusinya itu adalah lakukanlah pilkada serentak, sehingga ada share pendanaan antara kabupaten/kota dan provinsi, itu kan artinya tinggal menambah kaleng/kotak suara dan kertas suara aja, petugas-petugasnya biar sama, kalau misalnya petus-petugasnya sekarang dikasih 50 ribu ya tinggal ditambahin aja 30 ribu atau 50 ribu, itu kan lebih irit kan.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam

pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Tegakan hukum, jangan pilih kasih, jangan mentang-mentang incumbent kita diemin, apakah penegak hukum tidak tau ada money politic, tau. Mereka itu tau ada ini ada money politic, cuman mereka itu malas aja bergerak, termasuk mereka ikut menikmati. Pembatasan kampanye tidak bisa dilakukan, kalau pembatasan iklan iya bisa. Coba kita liat, mana kepala daerah yang laporan keuangan kampanyenya itu beres, itu banyak bohong yang dilaporkan dana kampanyenya.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Setuju, karena sudah saya bilang dipilih oleh DPRD adalah demokratis tapi dipilih rakyat itu lebih bagus. Kemunduran demokrasi karena hal ini tidak melibatkan banyak orang.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Jadi anggota DPRD itu kan punya fraksi, fraksi itu kan bukan alat kelengkapan dewan, fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai. Kalau di PKS itu, ya Alhamdulillah fraksi itu punya kegiatan seperti rapat rutin, yang kemudian disitu juga dihadiri oleh utusan partai yang membidangi, yaitu bidang kebijakan publik. Sehingga apapun langkah-langkah fraksi diketahui oleh partai, ataupun kebijakan-kebijakan partai itu dijelaskan oleh fraksi. Jadi bisa sama-sama lancar.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur?

Jawab: Kalau kita punya perahu utuh, maka pasti kita akan mencalonkan kader internal, tapi karena kita PKS tidak punya perahu utuh kurang 5/6, ya kita harus kompromi atau koalisi, koalisi ini kan isinya kompromi-kompromi. Ya ini prosesnya ini belum selesai, jadi tidak enak kalau disampaikan, tidak bisa diomongkan.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Pasti, karena kita itu PKS konsisten, komitmentnya tinggi.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Ya kena sanksi.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Ahmad Bastari, S.Sos.
Asal Partai Politik : Partai Amanat Nasional (PAN)
Jabatan : Wakil Ketua DPW PAN Lampung / Ketua Pusat Komunikasi Politik DPW PAN Lampung.
Alamat Kantor : Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jl. WR. Monginsidi No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung 35215
Alamat Rumah : Jl. Karya Muda I, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Komerling OKU
Pendidikan Terakhir : S1 / S2 (Dalam Proses)
No Tlp / HP : 082182077750
Waktu Wawancara : Jumat, 19 Oktober 2012 / 09.30 - 09.59 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Komisi I DPRD Provinsi Lampung.



(Proses wawancara dengan Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Lampung / Ketua Pusat Komunikasi Politik DPW PAN Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: Ya kalau saya si berpendapat kalau untuk pemilihan gubernur itu, sekarang ini kan sedang dilakukan pembahasan terkait revisi UU No 32 Tahun 2004, kita juga kan sudah pernah melakukan pemilihan gubernur secara langsung kemudian sekarang kita ada wacana dengan pemerintah dan DPR RI dikembalikan lagi kepada perwakilan yaitu dipilih oleh DPRD. Saya berpendapat kalau DPRD kabupaten/kota tetap langsung, karena mereka punya wilayah, daerah, dan penduduk itu kan kabupaten/kota, tapi kalau provinsi saya sepakat dengan pendapat pemerintah untuk mengembalikannya lagi ke sistem perwakilan di DPRD provinsi, karena alasannya gubernur itu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, tetapi kalau kabupaten/kota kan memang punya daerah dan wilayah, sedangkan kalau gubernur kan tidak dan sifatnya hanya sebagai koordinator dan perpanjangan tangan pemerintah pusat saja.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Betul, jadi dari sekian banyak alasan yang masuk akal itu adalah mahalnya ongkos pilkada itu, bukan hanya ongkos pilkada yang hanya dikeluarkan pemerintah saja di dalam APBD, tapi juga bagi calon yang akan mencalonkan diri itu juga menjadi beban yang cukup besar. KPU saja sudah mengajukan anggaran sekitar 170 miliar kemarin, di Jawa Timur itu mencapai triliunan, bayangkan itu. Itu belum biaya dari calon, masyarakat yang minta ini, itu dan sebagainya.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Bayangkan saja kalau satu calon mengeluarkan sampai seratus miliar misalnya, bagaimana dia mengembalikan uang itu, makanya itu juga memiliki potensi untuk kepala daerah korupsi kalau itu terus dilakukan. Kemudian yang kedua alasan lain adalah sumber, saya juga secara pribadi menilai bahwa itu juga dalam tanda petik merusak moral karena kebiasaan dari masyarakat kita untuk menerima dan menerima dari calon-calon itu. Sehingga ukuran demokrasi itu kan jadi tidak murni, karena berdasarkan suara yang dibayar. Karena bayar suara itu ongkos

politik calon itu yang menjadi tinggi, sehingga pada akhirnya kualitas calon juga harus ukurannya karena dia banyak uang.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab : Ya sama seperti itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sifatnya hanya sebagai koordinasi, karena dia tidak punya wilayah, daerah, dan penduduk, yang punya itu adalah bupati/walikota, gubernur itu tidak lebih sebagai koordinator dan wakil pemerintah pusat di daerah. Ya berkaitan dengan itu juga mestinya harus menyesuaikan dengan sistem pemilihannya, sesuai dengan kapasitas dan perpanjangan pemerintah pusat di daerah, jadi dilakukan seperti era sebelumnya yaitu dipilih DPRD.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Ya, kalau menurut saya demokratis. Karena kita anggota dewan yang duduk disini kan hasil proses demokrasi jugadan representasi rakyat juga dan kalau di pilih DPRD sangat demokratis, tidak mengurangi arti demokrasi itu sendiri. Karena gubernur yang dipilih melalui DPRD melalui proses yang demokrasi, karena mereka juga dipilih oleh wakil-wakil rakyat berdasarkan suara riil dari masyarakat.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Iya, tadi kan bicaranya soal ongkos politik yang murah secara riil. Tapi kalau *money politic* itu soal lain lah ya dibalik itu, tapi soal ongkos politik yang riil yang dikeluarkan calon-calon itu tidak bisa dihindari, berbeda sekali kalau dipilih oleh DPRD, dia tidak perlu kampanye, dia tidak perlu pasang baliho, tidak perlu sosialisasi dari jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Cukup di lembaga itu, dia siapkan visi-misinya, dia sampaikan visi-misinya kepada anggota DPRD, itu kan paling sederhana. Kalau soal *money politic* itu saya tidak bisa memastikan ada atau tidak, tapi mungkin praktek *money politic* itu agak susah dibuktikan, tapi kalau ongkos politik itu mungkin, misalnya dia harus sebagai bentuk balas budi dimana dia menggunakan perahu partai tertentu misalnya, otomatis kan punya komitmen dengan partainya, untuk membesarkan partainya, ya mungkin donk partainya yang membesarkan dia dan menjadi gubernur, gubernur tidak memiliki komitmen apa-apa. Nah kalau itu ongkos politik yang saya pahami.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?

Jawab: Kalau itu kita jangan mempertentangkan antara partai dengan masyarakat. Kan partai dengan rakyat tidak berbeda, tentu kan partai akan mengikuti kata masyarakat juga, sehingga tidak perlu kita pertentangkan antara instruksi partai dengan kehendak rakyat. Karena itu tadi, partai jelas menjalankan apa keinginan rakyat.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: Ya itu, saya disini wawancara kan atas nama partai, jadi terkait pelaksanaannya karena dalam UU No 32 Tahun 2004 itu kan harus ada revisi, jadi ya tergantung dari undang-undang itu, apapun itu kita sepakat, memang kalau dipilih langsung itu bupati/walikota wajib dipilih langsung, tetapi kalau gubernur saya sependapat ini dikembalikan kepada DPRD sebagai lembaga perwakilan.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Yang paling sederhana adalah dipilih oleh DPRD, karena kalau dipilih oleh DPRD itu cukup diselenggarakan satu hari, baik itu mau satu putaran, dua putaran, tiga putaran juga cukup satu hari, tidak melibatkan banyak pihak, hanya cukup DPRD, cukup hanya menyiapkan kertas suara, calon tidak perlu kampanye dan tidak perlu pasang gambar baik calonnya atau pemerintahnya, hanya sosialisasi saja tentang pelaksanaan dan waktunya. Jadi paling sederhana ya itu, walaupun ada misalnya gubernur itu ditunjuk oleh pusat tetapi kan kayaknya tidak mungkin, tetap yang memungkinkan dalam aturan adalah dipilih oleh DPRD.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Ya itu tadi logikanya, satu calon harus mengeluarkan setidaknya ratusan miliar, paling kita hanya 14 kabupaten/kota mulai dia harus sosialisasi sampai masa kampanye, itu kan memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pasang baliho, promosi, iklan sampai dia membeli perahu dan sebagainya. Nah itulah cost politik yang cukup mahal bahkan sangat

mahal, dan itu katanya yang bisa menang hanya calon yang mempunyai uang. Jadi solusinya hanya itu, prosesnya dikembalikan kepada perwakilan atau DPRD untuk menghindari biaya tinggi.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Saya rasa tidak, justru kita sudah maju, sejak tahun 2005 kita sudah dipilih langsung, dan kalau dipilih oleh perwakilan di DPRD saya kira tidak mundur. Tapi kalau bupati/walikota iya, saya setuju langsung dan kalau dia dipilih oleh DPRD itu baru kemunduran.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Bagus, dan yang pasti baik. Kalau di DPRD yang namanya fraksi adalah perpanjangan tangan dari partai, sehingga fraksi itu ya harus menjalankan program partaidengan kebijakan partai.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur? Siapa?

Jawab: Pasti, kita akan berusaha mendorong untuk kader internal terlebih dahulu untuk mencalonkan diri. Ketika kader internal kita tidak ada baru kita mencari calon yang berkualitas dan calon yang memenuhi dan memiliki komitmen, calon yang memiliki visi dan misi yang sama dengan partai kita. Kalau PAN sendiri kader internal yang potensial dan layak adalah ketua DPW kita, bapak Abdurrachman Sarbini.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Pasti, itu kan kebijakan dan intruksi. Fraksi itu kan kepanjangan tangan dari partai, jadi tidak bisa melanggar, harus menjalankan kebijakan dan intruksi partai.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Ya tentu ada sanksinya lah.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Hi. Pattimura, SE.
Asal Partai Politik : Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Jabatan : Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung
Alamat Kantor : Jl. Cut Nyak Dien No. 44/62, Palapa, Bandar Lampung
Alamat Rumah : Jl. Wortel Blok A, No. 03, Beringin Raya, Kemiling,
Bandar Lampung.
Pekerjaan : Wiraswasta / Pengusaha
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Lampung
Pendidikan Terakhir : S1
No Tlp / HP : 0858401017222
Waktu Wawancara : Rabu, 10 Oktober 2012 / 13.25 - 15.15 WIB
Tempat Wawancara : Kantor DPD Partai Gerindra Lampung



(Proses wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: Kalau saya si melihatnya apa latar belakang awal pemerintah mengajukan usul yang seperti itu, sedangkan sekarang ini kan semangat demokratisasi, semangat keterlibatan masyarakat secara penuh dalam rangka untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dalam demokrasi ini kan sebenarnya menjadi bertolak belakang sama semangat masyarakat yang sedang muncul hari ini. Kita tidak berbicara dulu manfaat dan mudharatnya lah ya, kita lihat semangat awal, kenapa dulu ada pemilihan langsung, darimana ini akarnya muncul. Sebelumnya kita pemilihan dengan sistem dipilih DPR, baik presiden, bupati, gubernur. Kemudian kita juga harus melihat bahwa kenapa arus besar ini menghendaki adanya pergantian pola pemilihan dari tidak langsung ke langsung masyarakat. Nah itu kan tidak lepas dari semangat reformasi dan semangat perubahan waktu itu. Kalau berbicara sampai sejauh mana arah perubahan perundang-undangan kan arahnya sudah jelas, yang menjadi pertanyaan kita hari ini kan sebenarnya kemana road map pembangunan politik bangsa ini, kan seharusnya ada road map, ada peta jalan pembangunan politik kita ini 20-50 tahun kedepan arahnya ini mau kemana, kalau tidak begitu ya pikiran-pikirannya ya instant. Hari ini mikirnya, oh begini aja, besok lain lagi, besoknya lain lagi, itu harus clear, road map pembangunan politik kita itu akan menjadi dasar apa langkah atau alat yang mau dibawa. Kalau masalah langsung dan tidak langsung itu kan sekedar teknis. Tapi road map pembangunan politik kita ini seharusnya bagaimana keterlibatan masyarakat kita ini secara luas, ikut berpartisipasi, akuntabilitas, bagaimana calon yang terpilih lebih dipercaya oleh masyarakat, kemudian juga bagaimana agar calon yang terpilih kedepan lebih bisa membumi di masyarakat. Ini kita belum berbicara untung-ruginya. Kalau berbicara UUD 1945, banyak pendapat ahli, pengamat, atau orang-orang yang pintar pada bidangnya, UUD kita dan Pancasila kan mengamanatkan permusyawaratan perwakilan, ini yang menjadi dasar orang kenapa harus kembali ke DPR, karena UUD-nya mengamanatkan pada sila 4 Pancasila. Ini yang dijadikan akar dia orang untuk mengembalikan, bahwa seluruh proses itu harus kembali pada permusyawaratan perwakilan. Apa logika permusyawaratan perwakilan? Ya pemilihan gubernur harus melalui DPR. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa hanya gubernur saja yang harus dipilih oleh DPR kalau akarnya adalah itu, kenapa tidak presiden, bupati tidak dikembalikan lagi?. Nah ini kan nada dikotomi fikiran yang tidak konsisten. Arus besar sekarang ini kan menghendaki partisipasi

masyarakat secara luas dalam politik, maka muncul UU Pemda yang mengatur tentang Pilkada, karena revisi muncul lagi tentang UU Pilkada. Tadinya kan tentang Pilkada ini kan menjadi sub dari UU Pemda, tetapi perkembangan terakhir sedang dibahas tentang ini, dan usulan pemerintah dikembalikan kepada DPRD Provinsi. Dan usulan itu juga menjadi aneh, kenapa koq usulannya cuma gubernur, apa bedanya gubernur dengan bupati, harusnya juga ini nyakut juga kenapa usulannya juga tidak presiden. Argumen orang mengatakan bahwa ah kalau gubernur ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, banyaklah logika-logika yang dibangun. Tetapi kalau berbicara tentang road map pembangunan politik kedepan ini, itu harus satu-satu kita urai, masalahnya bukan setuju atau tidak setuju. Kalau masalahnya setuju tidak setuju, biasanya tergantung siapa yang kita tanya, kalau Tanya anggota DPR pasti ngomong kembalikan saja ke DPR, karena itu ada uang beredar, beredarnya tidak kemasyarakat, tapi ke DPR. Kalau tanya tukang sticker, tukang banner, tukang bambu, pasti mereka setujunya langsung, karena itu menyangkut hajat hidup usaha ekonomi. Kalau ditanya ke calon itu bervariasi, ada calon yang setuju di DPR, ada calon yang setuju langsung, tergantung calonnya itu memandang dia itu kuatnya dimana. Kalau dia kuat dan populernya dimasyarakat, dia pasti pilih langsung, kalau dia kuatnya di DPR dalam rangka menkonsolidasi suara DPR, pasti dia setuju ke DPR. Makanya kalau kita berbicara persepsi, pasti akan berbeda-beda, tetapi dalam konteks hari ini kita berbicara lebih luas, yang mana paling bisa membangun akuntabilitas, membangun kepercayaan masyarakat, yang bisa melibatkan masyarakat secara lebih mendasar terhadap proses-proses demokrasi, itu yang seharusnya dianalisa. Sehingga alat analisis itu kan ke road map itu tadi, arah pembangunan politik kita mau kemana. Kalau pemilihan langsung memang punya manfaat keterlibatan masyarakat bisa menjadi penuh, masyarakat bisa lebih dekat dengan calon pemimpinnya, tetapi karena informasi ini tidak merata, sehingga banyak manipulasi-manipulasi terhadap calon A, calon B, apalagi di desa, dikampung, orang tidak persis tau siap calonnya itu, tetapi ketika dia turun enak didengan, datang bawaan, kadang-kadang orang sudah langsung, dalam hal ini track record calon apakah calon ini bisa membangun seperti yang dia janjikan, bagaimana latar belakang dia, ini masyarakat tidak banyak tau. Malah kadang-kadang terjadi diskorsi di lapangan, dan kadang-kadang calon yang terpilih juga bukan calon yang terbaik seperti yang diharapkan masyarakat. Sebenarnya tingkat konfliknya juga tinggi dibawah, jadi merusak juga struktur social di masyarakat, karena tingkat persaingan yang tinggi, akhirnya masyarakat terkotak-kotak. Jawabannya adalah, itu harus dijadikan alat analisa bagaimana kalau kita berpikiran, inilah yang tetap terbaik secara langsung, bagaimana caranya meminimalisir potensi-potensi mudharat pemilihan secara langsung, bukan oh kalau gitu harus

lewat DPR, jadi kalau gitu pikiran dulu itu gimana ke pemilihan langsung, pikiran kita kan lompat-lompat, akhirnya peta jalan kita kan bolak-balik, tidak pernah ada menuju ke arah yang lebih mantab. Pemilihan oleh DPR ini memang lebih efisien secara pengadaan logistic, persiapan, dll, tapi kan mengalisi system kan tidak sesederhana itu, dan memang kalau di DPR informasinya bisa merata, anggota DPR bisa sudah tau calon A, calon B, calon C, sudah taulah informasi A-Z tentang sifat, karakter calon tersebut, karena kan mereka ini kelompok politik itulah yang menjadi alasan mereka untuk mengambil keputusan apa yang harus dipilih. Kita tidak membicarakan tentang money politic, karena money politic disemua tingkatan itu ada, yang harus kita tanya adalah bagaimana cara meminimalisir potensi tersebut agar semakin lama semakin hilang. Jadi gak usah di DPR, orang pemilihan kepala desa saja faktanya sudah seperti itu. Dan ini kesalahannya dimana, nah ini kita perlu spesifikasi khusus, ini kesalahannya dimana, di pemimpin politik, dimasyarakat, masyarakat memang sudah cenderung pragmatis, instan, dll, atau di system. Nah ini kan perlu kita, harus ada kajian yang khusus tentang itu.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Jadi dia tidak bisa dihadap-hadapkan dalam analisis itu dengan yang sifatnya biaya, kalau memang tidak mahal tunjuk saja langsung oleh presiden, karena gubernur kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, jadi tidak usahlah dipilih-pilih DPR, itu kalau mau lebih hemat lagi. Jadi tidak terjadi lagi praktik dagang sapi di DPR, tidak terjadi lagi dimasyarakat. Sebenarnya itu tidak bisa dijadikan alasan, kan untuk mengantisipasi mahal tidak mahal, itu kan bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah ide menyatukan seluruh pemilihan eksekutif dan menyatukan seluruh pemilihan legislatif, artinya hanya ada dua kali pemilu diseluruh republik ini selama lima tahun. Ketika pemilihan legislatif, itu memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Kemudian pemilihan eksekutif langsung memilih presiden, gubernur, bupati/walikota, itu kalau mau mengefisienkan biaya, dan kita juga tidak setiap saat ketemu dengan pemilu, jadi energi bangsa tidak habis untuk mengurus pemilu ke pemilu. Kalau hanya masalah efisiensi, kenapa tidak diatur oleh sistem untuk menggabungkan keseluruhan. Kalau berbicara efisiensi, kenapa tidak kabupaten/kota, provinsi kan hanya 33 provinsi, tetapi kalau kabupaten/kota kan hampir 500 kabupaten/kota.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Jadi kembalinya ke kabupaten/kota juga donk kalau alasannya itu, kenapa koq cuma provinsi, kalau provinsi kan gubernurnya cuma 33, tapi kalau bupati/walikota kan lima ratusan, jadi itu kalau alasannya biaya politik yang besar dan berpotensi untuk kepala daerah korupsi. Ini kan kadang-kadang alasannya yang tidak konsisten, kenapa koq hanya gubernur, kenapa tidak langsung saja di kabupaten, mana yang lebih banyak sekarang yang masuk penjara gara-gara korupsi, bupati atau gubernur? Kan lebih banyak bupati yang tersangkut korupsi.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab: Kalau kita memang mau ideal, bahwa gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah, ini kita ini tidak perlu ada dinas-dinas di tingkat provinsi. Apa gunanya, ada dinas pertanian, ada dinas ini, ini di provinsi, kan seharusnya fungsi provinsi ini kan hanya fasilitator, toh kepala dinas pertanian tidak bisa instruksi langsung kepada dinas pertanian di kabupaten/kota, mereka otonom, dia hanya ikut perintah bupati, dia tidak struktural seperti itu. Akhirnya kan provinsi perilakunya seperti kabupaten/kota, yang seharusnya dia berfikir bagaimana mengkoordinasi seluruh lampung akhirnya dia sektoral per dinas-dinas. Jadi tidak terjadi sinergi, akhirnya dia jadi kabupaten ke 15. Nah ini kan tidak sinergi, sementara kepala-kepala daerah mereka raja-raja kecil di daerahnya masing-masing. Seharusnya diawal itu sudah ada kebijakan anggaran kabupaten, kebijakan anggaran provinsi itu seharusnya sinergi. Kalau ini kan tidak, jalan sendiri-sendiri, seharusnya visi Lampung secara utuh itu apa? Nah ini aspek sinergi juga penting, kita RPJP, RPJM, nah ini kan seharusnya sinegi, jadi kabupaten/kota ini jadi penyangganya.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Demokratis, kalau kita berbicara demokratis itu kan sistem, jadi dipilih DPRD ya tetap demokratis, dasarnya adalah sila ke empat pancasila, kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, tidak salah dan menyalahi UUD. Permasalahannya kan apakah demokrasi ini kan bukan kebenaran, yang namanya demokrasi, output demokrasi itu bukan kebenaran. Demokrasi dalam pemahaman saat ini kan, demokrasi itu ya suara terbanyak. Saya kasih contoh, ada 10 orang yang 8 orang pengacara, 2 orang dokter spesialis jantung. 10 orang ini merdebat kenapa ini si A meninggal, 2 orang dokter ini mengatakan

karena jantung, rombongan pengacara mengatakan bukan, ini karena penyakit panu, karena tidak terjadi akhirnya voting, siapa yang menang, pengacara. Artinya output demokrasi belum tentu kebenaran, apalagi memilih pemimpin politik, tapi itulah proses demokrasi.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Itu pasti terjadi, karena *money politic* dalam konteks perpindahan dari masyarakat ke anggota DPRD, dalam konteks menjaga integritas untuk tidak melibatkan masyarakat terhadap dampak negative dari pilkada, itu ada benarnya. Artinya kalau ada konflik, *money politic*, ya dilokalisir di lembaga perwakilan saja, masyarakat tidak diikut-ikutkan dengan masalah tersebut. Jadi praktik *money politic* pasti ada potensi itu, karena DPRD ini kan isinya bukan malaikat, isinya itu orang, begitu juga dengan parpol, mau parpol Islam, atau non Islam, isinya orang semua tidak ada yang isinya malaikat.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?

Jawab: Jadi kan gini ya, kalau berbicara anggota DPRD kita ini kan bervariasi, ini kan kita berbicara individu-individu. Kalau kelembagaan DPRD-nya, tidak boleh disalahin karena ini adalah kelembagaan demokrasi, isinya orang-orang didalam bervariasi, dari latar belakangnya, motivasinya dalam rangka untuk mengambil keputusan, dan seperti apa setelah dia terpilih di DPRD bagaimana mekanismenya untuk dia bisa mengetahui konstituennya menghendaki yang A, yang B, yang C, dan seterusnya juga kan memang tidak ada mekanismenya atau untuk mengukurnya dan ini juga menjadi subjektif, tergantung lobi-lobi calon kepada anggota DPRD, kan kembali lagi kesitu akhirnya. Karena dia terpilih sebagai anggota DPRD dari suara terbanyak dari siapapun dia tidak tahu, karena ini kan langsung, umum, bebas rahasia. Dia mau tanya ke konstituennya, apa yang mau dia tanya, kemana mau tanyanya, paling tidak dia mempunyai visi, bahwa calon yang harus diusung harus mempunyai karakter, track record yang jelas, orang baik yang kedepan kalau terpilih akan bisa membangun Lampung ini secara baik, orang-orang yang tidak mau menumpuk kekuasaan dia dan keluarganya saja. Nah paling ukuran-ukuran itulah yang bisa dijadikan ukuran untuk menentukan pilihan, tetapi kalau dia menanyakan ke masyarakat, kan artinya dia harus ada pemilu, referendum, atau apapun namanya. Tapi kan anggota DPRD pasti sudah punya informasi yang lengkap, dan biasanya juga tidak terlepas dari dinamika-dinamika yang ada di DPR, dinamika yang

ada di partainya, politik-politik yang dibangun. Karena anggota DPRD juga tidak berdiri sendiri.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: Jadi kalau sikiap partai sebenarnya lebih sepakat dengan sistem langsung seperti selama ini, alasan kita ya seperti tadi itu.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Saya itu dua periode menjadi anggota KPU, kalau masalah pembiayaan segala macam, jadi yang paling penting itu adalah kalau memang itu kenapa tidak kembali ke ide untuk penyatuan, hanya ada dua kali pemilu, satu pemilu legislatif, satu lagi namanya pemilu eksekutif, untuk memilih dari atas sampai bawah. Jadi orang tidak bolak-balik ke TPS. Salah satu idenya itu penyatuan seluruh secara nasional, kalau ini kan tambal sulam, argument tentang biaya kan tidak bisa diterima secara utuh kalau hanya pilgub, kembali saja semua, kenapa tanggung-tanggung. Makanya landasan untuk sistem, itu kan harus ada payung besarnya untuk membangun keterlibatan publik secara lebih luas, tidak boleh secara parsial, jadi alasannya tidak tepat.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Jadi semua itu harus kembali pada payung hukum yang diatas.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Itu tadi, kembali ke road map pembangunan demokrasi kita. Kita bisa berbicara apakah mundur apa tidak, kan kalau ada petanya, petanya mau kearah mana? Petanya kita kedepan ini kan melibatkan seluas-luasnya partisi publik, kalau petanya seperti itu, artinya kan hari ini partisi publik di hilangkan, dikembalikan lagi ke perwakilan. Saya tidak bilang ini maju atau mundur, tapi sejauh mana visi pembangunan demokrasi di Indonesia ini. Kalau visinya adalah melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya, artinya hari ini dikembalikan lagi, paling melalui saluran-saluran DPR.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Kalau kita disini, untuk urusan-urusan yang sifatnya teknis, operasional di DPRD itu kita serahkan sepenuhnya kepada fraksi yang ada di DPRD. Dinamika yang terjadi di dalam, atau apakah itu kita serahkan sepenuhnya kepada fraksi. Kita tidak terlalu jauh dalam rangka untuk mengintervensi melalui kebijakan. Karena yang tahu tentang hari-hari A sampai Z nya yang ada di DPRD ya merekalah anggota DPRD. Jadi kita sifatnya hanya sebatas koordinasi, tidak ada yang sifatnya intervensi, kecuali memang halnya sudah betul-betul sangat krusial, tidak bisa ditangani lagi oleh fraksi, itu partai bisa istilahnya melakukan pemanggilan atau klarifikasi atau saran, tetapi sejauh ini tidak pernah kita lakukan hal itu. Intinya gini, bahwa anggota DPRD itu kan kepanjangan tangan dari partai, visi-misi menjadi anggota DPRD mereka sudah tahu, rambu-rambu harus dilakukan mereka sudah jelas, kecuali ada pelanggaran-pelanggaran baru parti bisa turun, karena yang kita jaga ini kan nama baik partai, jelek mereka jelek partai, dan mereka juga harus sadar bahwa mereka disitu bukan diruang kosong, mereka disitu ada karena partai, tapi selama ini untuk urusan internal DPRD ya fraksi, silahkan ambil inisiatif untuk mengambil keputusan.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur?

Jawab: Kalau untuk kader internal, Partai Gerindra sudah bulat memutuskan bahwa kader internal kita akan maju untuk pemilihan gubernur, apakah dia langsung atau perwakilan, 2013, 2014, atau 2015, itu Partai Gerindra akan mengusung kader internal. Siapakah yang sudah disepakati di Partai Lampung kita, yaitu yang paling layak adalah ketua DPD kita bapak Gunadi Ibrahim, beliau juga anggota DPR RI dan selama satu tahun ini sudah mendapatkan masukan, dukungan dari desa, kecamatan, DPC, dan juga sudah dikonsultasikan ke pusat, bahwa yang paling tahu tentang Lampung dan yang paling layak yaitu pak Gunadi. Makanya hari ini pun satu-satunya partai yang sudah melakukan komunikasi politik ditingkat bawah melalui ranting, kecamatan terhadap calon gubernurnya ya Partai Gerindra. Artinya kita punya kepentingan tahun 2013 ini kita harus maksimal maju menjadi gubernur dalam rangka kita untuk memenangkan pilgub, memenangkan pileg, dan untuk memenangkan pak Prabowo sebagai presiden. Kalau ada orang beranggapan dan berharap partai ini mau di jual, disewain tidak ada. Gunanya ada partai ini kan untuk potensi kader, untuk mengembangkan kader maju, mengembangkan partai ini besar, bukan untuk di jual-jual. Karena fungsi partai politik ini kan melakukan recruitment politik, pendidikan politik, kecuali kalau memang tidak ada kader kita yang layak, yang punya kapasitas, itu bisa saja kita ngebom dari luar.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Jadi kan gini, anggota DPRD itu kan perpanjangan tangan dari partai, menjalankan visi dan misi dari partai, anggota DPRD itu tidak bergerak diruang kosong. Jangankan anggota DPRD, kalau dia pemilihan langsungpun seluruh struktur harus solid, dari ketua ranting, pengurus kecamatan siseluruh Lampung ini dalam rangka memenangkan partainya dalam rangka menjalankan visi-misi.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Ya kita kan tidak tahu, karena pemilihannya kan langsung, bebas, dan rahasia. Tetapi kita prinsipnya begitu, bahwa anggota DPRD adalah perpanjangan tangan dari partai.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Ir. Hj. Nurhasanah, MM.
Asal Partai Politik : Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Jabatan : Bendahara DPD Partai Hanura Provinsi Lampung /
Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung.
Alamat Kantor : Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jl. WR. Monginsidi
No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung 35215
Alamat Rumah : Jl. Pangeran Antasari No. 09 Bandar Lampung
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku : Jawa
Pendidikan Terakhir : S2
No Tlp / HP : 0811728853
Waktu Wawancara : Senin, 29 Oktober 2012 / 15.45 - 16.20 WIB
Tempat Wawancara : Kantor DPD Partai Hanura Provinsi Lampung.



(Proses wawancara dengan Bendahara DPD Partai Hanura Provinsi Lampung /
Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: Kita menyambut baik kalau memang mau dipilih lagi oleh DPRD, karena lebih hemat biaya, efisien, efektif, artinya penghematannya luar biasa. Misalnya seperti banner saja sudah berapa penghematan kita, berapa biaya untuk kita bangun TPS-TPS, saksi-saksi, tapi kalau melalui DPRD kan paling hanya 75 orang, artinya banyak sekali penghematan, justru uang itu bisa kita alihkan untuk keperluan yang lebih penting, seperti infrastruktur. Toh anggota dewan juga sudah perwakilan, namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat, jadi kita juga sudah mewakili. Seperti saya misalnya, dari Partai Hanura, ya saya sudah mewakili konstituen saya dari pemilih-pemilih Partai Hanura. Jadi kita menyambut baik, cuman karena ini masih menjadi polemik di DPR RI, belum ada ketok palu, ya mungkin bagi DPR RI ini tidak ada kepentingan bagi mereka, atau bisa jadi ini bisa merupakan langkah penjejalan bagi dia karena ini dipilih anggota DPRD provinsi, jadi nanti kalau dia mau mencalonkan kan mensti melalui daerah, ini merupakan suudzon mereka, karena kita kan tidak seperti itu.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Betul, liat saja sekarang KPU mengajukan anggaran sebesar 150 Miliar untuk satu putaran, coba kalau melalui dewan, tidak mencapai miliar-miliaran, paling 500 juta saja sudah cukup, kita kumpul, kasih makan siang, ya mungkin ada berkas-berkas, saya rasa tidak mencapai miliar-miliaran, berapa itu yang bisa kita hemat. Kita tidak perlu membangun TPS-TPS di desa, tidak perlu ada PPK, bayak sekali penghematan.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Betul, itu bukan rahasia lagi. Kita tidak usahlah untuk itu, untuk pemilu legislatif saja kadang-kadang orang dengan 50 ribu akhirnya menyesal lima tahun, itu sah-sah saja masing-masing kendidat, yang salah kan rakyat, kenapa mau, akhirnya ya itu resiko yang dia tanggung, jadi sangat transaksional politik kita. Jadi tidak ada kita bangun ikatan emosional yang seperti persaudaraan, ayo kita sama-sama merasa memiliki, merasa bertanggung jawab, kita memilih pemimpin ini supaya amanah, jadi ya repot kalau politik kita masih transaksional. Karena ini

kekuasaan, soal visi-misi, program, diterima atau tidak yang penting bagaimana caranya harus menang, itu yang kadang-kadang menghalalkan segala macam cara. Siapa yang salah, rakyat, kenapa mereka tidak jeli, tidak kritis, itu karena kadang-kadang uang kecil saja tergiur.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab : Inilah sebenarnya, otonomi daerah inilah yang menjadi awal mula kalau saya bilang musibah. Akhirnya peran gubernur, benar-benar ya sedikit dihilangkan, kalau dulu yang namanya gubernur terhadap bupati/walikota bagaimana, ya bisa, gubernur itu kan memang kepanjangan tangan dari pusat, sekarang dengan adanya otonomi daerah justru muncul raja-raja kecil di daerah, ya bupati-bupati sekarang mana mau lagi dengan Musrebang, kadang-kadang mereka tidak hadir, padahal majunya kabupaten/kota itu kan majunya provinsi, tapi kalau provinsi saja tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengkoordinir bupati-bupatinya kan repot. Terus bagaimana laporan gubernur ke pusat, begitu gubernur dipanggil ke pusat, ada hal-hal yang diturunkan ke kabupaten, akhirnya tidak bisa dibangun sinergi. Jadi otonomi daerah kita sebenarnya belum siap, akhirnya banyak yang masih terhutang, pak Risyad Rasyid itu juga mengakui, PADnya apa yang bisa diandalkan, dulu rencananya kan bagaimana daerah itu bisa membiayai untuk daerahnya sendiri, tapi ternyata kan tidak, akhirnya meminta-minta pusat, rakyat yang selalu dikorbankan, pajak terus yang ditingkatkan.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Iya, dewan itu juga kan dipilih melalui rakyat, seperti kita ini kan mewakili konstituennya masing-masing. Ya sewaktu kita mau memilih kan pasti ada rapat, misalnya kita bangun dulu dari PAC, giring dan gulirkan wacana, ini ada si A, si B, si C, nah dari partai kita siapa kira-kira, ini bukan kehendak pribadi, keputusan itu diambil berdasarkan mekanisme partai, ada di dalam AD/ART kita. Jadi bukan kita mengambil keputusan itu dari keputusan Nurhasanah. Saya duduk disana ya mewakili rakyat saya dari dapil saya, khususnya dari Hanura.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Saya bilang tadi, fungsi pengawasan. Yang namanya seperti itu kan tidak bisa kita hindari, makanya itu fungsi pengawasan, sekarang kan banyak

LSM, partai juga kita kan ngawasi kita, dewan-dewan ini kan merupakan kepanjangan tangan partai, jadi partai ini tidak mungkin diam. Makanya semua itu fungsinya dari partai, kalau partainya membiarkan, terus mencoba mencari keuntungan untuk partainya melalui anggota dewannya, ya rusak semuanya. Seperti beberapa survei, Partai Hanura termasuk partai yang bersih, ketahuan korupsi, tidak ada ampun kalau Hanura. Makanya saya termasuk bersyukurlah, punya ketua umum seperti pak Wiranto, yang benar-benar mengedepankan kejujuran, makanya kenapa NDP kita yang pertama ketakwaan, ya itu supaya kita takut dengan Tuhan dulu. Apalagi yang namanya politik itu kan abu-abu, tidak bisa kita generalisasikan hitam-putih, kalau putih itu kan majlis taklim. Apalagi LSM sekarang banyak, partai juga punya badan kehormatan. Jadi praktik seperti itu, jangan di dunia DPR, coba lihat, bagaimana penerimaan pegawai, sekolah, abri segala macam, itu saja ada. Nah itu yang menjadi peran kita untuk mengawasi, kalau kita sudah tahu bakal ada seperti itu, tapi tetap diterusin ya jangan dibiarkan. Kita ingin cari memang gubernur yang benar-benar mengedepankan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompoknya, bukan kepentingan pribadinya, jadi gubernur itu benar-benar menjadi milik bersama.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?

Jawab: Iya, kita ini kan representasi dari rakyat, seperti saya dari dapil Metro-Lampung Timur. Yang namanya dewan itu kan fungsinya sangat-sangat luas ya, misalnya saya di badan anggaran, saya akan mencoba, memang ini secara global untuk pembangunan Lampung, tapi karena saya dapil Metro-Lampung Timur, maka saya akan coba mengintip apa yang bisa dialokasikan untuk daerah sana. Seperti kita reses atau turun kebawah, banyak keluhan dan harapan masyarakat, nah ini akan saya suarakan di dewan, itu gunanya, program-program provinsi yang ada disana itu kan salah satu gebrakan-gebrakan dari kita, meskipun bukan hanya dari Hanura. Untuk dapil Metro-Lampung timur misalnya sekarang ada 11 anggota dewan dari sana, jadi tatkala kita sebagai anggota dewan dari dapil sana, kita bergabung, kita sudah tidak melihat dari partai mana, karena disitu peran kita wakil rakyat, jadi kita mencoba mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat di dapil kita. Semua juga begitu, sudah ada masing-masing perwakilannya di masing-masing dapil, jadi disitu kita mencoba membantu pak gubernur dimasing-masing dapil dari hasil reses kita mengintervetarisir apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat, itu yang coba kita suarakan yang menjadi tupoksinya provinsi. Tatkala provinsi tidak bisa, karena itu

wewenangnya kabupaten/kota, itu bisa kita suarakan melalui anggota dewan kita yang di kabupaten/kota, jadi bersinergi. Tapi juga kadang-kadang kita ngotot, tapi ya itu kembali lagi dengan kemampuan daerah.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: Ya sangat setuju apabila dipilih melalui dewan, bukan malah semakin mundur, justru itu yang namanya penghematan, seperti hari ini saja sudah berapa hutang kita, semakin naik, setiap bayi lahir sudah berapa yang menanggung hutang kita. Euforia yang seperti ini, akhirnya tetangga dengan tetangga ribut, gara-gara ini. Karena setelah program ini di gulirkan ternyata lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Jadi yang namanya program, yang namanya suatu sistem kalau memang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat banyak ya bisa dievaluasi.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Kayaknya demokrasi kita hanya dua wacananya, langsung dan tidak langsung, pilihannya ya itu. Kalau langsung ya melalui rakyat, kalau tidak langsung melalui dewan. Kalau langsung, ya ada segi positifnya ada segi negatifnya, yang tidak langsung juga demikian. Kadang-kadang orang menilai kalau tidak langsung hanya memperkaya anggota dewan, tapi kita kan ada pengawas, ada LSM, ada KPK, mungkin bisa jadi nanti kita ada kameranya, sekarang kan sudah canggih. Saya rasa tidak ada itu, karena langsung ini menurut saya lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, jadi kembalikan saja seperti yang awal. Kemudian solusi lain yang berkembang seperti pilkada serentak, tapi kan begini seperti nanti tahun 2015 itu kan ada 7 kabupaten/kota, memang kalau mau efisien itu bisa digabung, cuma kemabli lagi ke pemilihan langsung melalui rakyat, tetap juga kita harus bangun TPS, ada PPK, tetap saja, coba kalau dihitung-hitung tetap banyak, tidak mungkin tidak. Masing-masing kabupaten yang bertanggung jawab, masing-masing KPU kabupaten punya tanggung jawab, masing-masing kabupaten menganggarkan anggaran untuk pilkadanya. Jadi tetap saja, cuman judulnya saja yang digabung, tapi ini kan dananya masing-masing.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Kalau menurut saya ya peran partai, jadi calon itu yang muncul itu benar-benar orang yang mengutamakan kepentingan masyarakat, politik kita kan masih lewat partai, independent mana, karena kita masih punya perwakilan. Jadi kuncinya lewat partai dulu, disitulah kita godok, nanti kita baru tahu mana kader yang benar-benar bisa bekerja dengan partainya untuk membangun daerahnya, jadi filternya melalui partai dulu. Kalau setiap partai kan punya platform perjuangan, seperti di Hanura punya nilai dasar perjuangan, ketakwaan itu nomor satu, jadi kalau orang agamanya sudah kuat, dia pasti, ya meskipun yang namanya politik itu tidak bisa bersih-bersih amat, tapi minimal meminimalisir. Kemudian yang kedua kebersamaan, kesederhanaan, kemandirian. Itu kita punya, setiap partai punya platform, visi-misi, atau arah perjuangan, apalagi seperti Hanura ini kan lebih mengedepankan hati nurani. Saya yakin, kalau orang-orang di Hanura ini tidak pakai hati nurani pasti terbuang koq.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Produk DPRD yang dulu jangan disamakan dengan yang sekarang, dulu mungkin fungsi pengawasan, LSMnya. Ya sekarang kan banyak lembaga pengawasan, setiap saat dewan bisa dikritisi, seperti sekarang anggaran pendidikan hanya 7,3 %, kita diteriakin. Jadi jangan era dulu, era Orde Baru, era Reformasi jangan disamakan dengan sekarang, sekarang kan sudah mulai canggih, yang namanya kita rapat banang kan rekaman dimana-mana, KPK ada dimana-mana, HP kita saja semua dewan di sadap. Bukan kita tidak tahu, saya rasa tugas kita sudah semakin tidak lagi terpikir mau ini, apalagi kondisi bangsa kita yang saat ini semakin membuat sedihlah. Ya sekarang gini, suatu produk, program, suatu sistem, itu kan memang kita bisa tahu itu bisa diteruskan, kalau itu memang bermanfaat, kalau itu bagus, itu kan karena ada evaluasi, tapi kalau memang tidak bermanfaat banyak mudharatnya, kenapa harus diteruskan, jadi bukan kita mundur, ini kan proses, jadi harus sama-sama kita sadari, bukan kita kembali itu mundur.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Hubungannya, partai itu menjadi koordinator kita, jadi kita di DPRD merupakan sub-sub coordinator, jadi kebijakan apapun yang kita ambil harus tetap koorninasi dengan partai. Misalnya seperti mau pandangan umum fraksi hasil laporan pertanggung jawaban gubernur. Jadi dalam partai kita, kalau yang sifatnya kadang-kadang harus segera, mungkin kita hanya melaporkan, tapi kita selalu harus ada komunikasi terhadap partai, apalagi sekarang sudah semakin canggih, ada handphone, e-mail. Jadi setiap kegiatan di fraksi itu kita selalu lapor dengan partai, karena

yang namanya keputusan dan kebijakan fraksi itu ada campur tangan partai.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur?

Jawab: Kenapa tidak mungkin, karena kader partai Hanura banyak yang punya potensi, tapi ya kembali lagi kalau partai Hanura untuk calon gubernur kita punya mekanisme, itu ada tim seleksi pilkada, tim monitoring, tim evaluasi, tim investigasi, itu langsung pusat, jadi pusat yang akan mengevaluasi sampai kebawah karena banyak kandidat-kandidat kader-kader Hanura yang sudah mampu. Apalagi ketua umum kita itu adalah seorang jenderal, strateginya, intelijennya, jalan semua, jadi didalam mengambil keputusan itu seperti mau menentukan calon gubernur, pasti dengan pertimbangan matang. Untuk sementara kader-kader Hanura yang memang sudah ada beberapa kabar untuk siap maju dalam pilgub seperti Bapak Ferdinand Sampurna Jaya dan Ibu Elza Siarief, itu cukup potensial semua, imbang, karena saat ini memang juga masih perang di banner ya, belum pernah dibicarakan dari hati kehati.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Ya jelas donk, itu kan sudah hasil godokan dari partai, apalagi partai kita adalah partai hati nurani, pasti yang dipilih itu yang benar-benar punya hati nurani, kan memang hati nurani itu kebenaran yang sejati. Ya minimal lah, karena politik itu kan tidak bisa selalu bersih tidak bisa putih, tapi minimal bisa meminimalisir. Saya yakin, pilihan Hanura pasti itu yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada anggota kita tidak sejalan dengan keputusan partai, itu sepertinya sangat tidak mungkin, itu yang namanya seleksi penggodokan itu sudah sangat matang, kalau ada yang masih bertolak belakang setelah diputuskan, pasti ada yang tidak beres itu, pasti ada apa-apanya.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Sanksinya tegas, berarti kan dia tidak menjalankan apa yang menjadi kebijakan partai, karena yang namanya fraksi itu di dalam AD/ART jelas, fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai, yang melaksanakan kebijakan partai. Jadi dia kan tidak melaksanakan kebijakan partai, itu ada sanksinya, sanksinya ada dan itu diatur juga dalam AD/ART. Jadi kalau dia sudah tidak mau dengar instruksi dari partai, jadi dia bernaung dalam partai apa?, kita ini kan bukannya majelis taklim, bukan perusahaan, kita ini partai.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Drs. Hi. Musa Zainuddin.
Asal Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Jabatan : Ketua DPW PKB Lampung
Alamat Kantor : Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jl. WR. Monginsidi
No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung 35215
Alamat Rumah : Jl. Anggrek, No. 7, Rawa Laut, Bandar Lampung.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Lampung
Pendidikan Terakhir : S1 / Ilmu Pemerintahan FISIP Unila
No Tlp / HP : 081379999996
Waktu Wawancara : Senin, 08 Oktober 2012 / 18.55 – 19. 35 WIB
Tempat Wawancara : Kantor DPW PKB Lampung



(Berfoto setelah melakukan wawancara dengan Ketua DPW PKB Provinsi Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: La iya, artinya kan begini itu kan euforia terhadap reformasi ini, dimana dulu pemilihan gubernur, bupati/walikota, presiden itu kan melalui sistem perwakilan, dipilih oleh DPRD dan DPR RI, kan gitu. Tapi euforia reformasi ini kan salah satunya kita ingin membenahi sistem demokrasi kita. Terkait dengan itu, ada amandemen terhadap UUD yang juga memungkinkan kita membuat undang-undang yang mengatur tentang pilpres, pilkada baik kabupaten/kota atau provinsi, termasuk di Lampung. Makanya kita sudah pernah mempunyai pengalaman memilih gubernur secara langsung yang telah berjalan 1 kali / periode. Hasil evaluasi dari para politisi, pakar, dan lain sebagainya. Meskipun saat ini masih pro-kontra, tetapi saya melihat dan menilai pemilihan langsung ini katakanlah dalam bahasa koq justru lebih besar mudharatnya ketimbang manfaatnya. Kelihatan perkembangan demokrasi sejak reformasi, sejak diadakan pemilihan langsung ini bukan justru semakin lebih baik, tapi justru koq pengertian, pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat ini semakin terjebak, terjerumus, atau mengendur, dan mundur. Yang namanya pilgub, kadang-kadang masyarakat selalu mengidentikan dengan amplop, sembako, dan lain sebagainya. Tetapi justru bukan untuk membangun demokrasi melalui, dengan memberikan amanah kepada seseorang untuk membangun dan menjadikan Lampung menjadi lebih baik. Dari wacana-wacana tersebut, muncul gagasan untuk dikembalikan pemilihan gubernur kepada DPRD dan saya sependapat dengan itu seperti yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI, daripada pilkada langsung ini lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya mengembalikan mekanisme pemilihan kepada DPRD. Dan yang menyuarakan ini kan bukan hanya dari PKB saja, ada partai-partai lain, ada ormas, termasuk beberapa penyelenggara negara lainnya. Walaupun masih adalah beberapa partai atau sekelompok masyarakat yang belum juga menginginkan pemilihan seperti itu.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Benar, termasuk salah satu alasannya memang itu, yaitu high cost yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarakan pilkada itu ternyata jauh lebih besar ketimbang diselenggarakan melalui DPRD. Belum lagi cost politik yang tidak menggunakan anggaran negara, itu tadi, kadang-kadang momentum ini dijadikan masyarakat atau sekelompok orang untuk

melakukan transaksi politik yang kemudian menjurus kepada money politic dan sebagainya.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Iya donk, kan logis donk berfikirnya. Misalnya setelah kepala daerah menjabat, ya katakanlah harus mengembalikan cost politik yang sudah dia keluarkan. Nah dari mana dia mendapatkan itu, kan tidak bisa mengandalkan gaji, honor, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya ber-KKN-lah, tidak menutup kemungkinan dia melakukan korupsi yang pada akhirnya akan merugikan rakyat dan merugikan keuangan negara.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab: Ya sebetulnya tidak juga, regulasinya kan tidak seperti itu sebenarnya. Ini kan hanya kesalahan kepala daerah saja menterjemahkan fungsi dan wewenangnya. Seorang gubernur itu kan selain sebagai kepala daerah yang merupakan representasi atau wakil dari pemerintah pusat, tetapi juga tugas-tugas kedaerahan, juga menjadi tanggung jawab beliau untuk melakukan pembiasaan. Jadi fungsi gubernur sebagai kepala daerah harus tetap berjalan, kan gitu. Kalau kita dengar misalnya ada bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi itu kan keliru, hanya karena lain partai tidak mau berkoordinasi. Oleh karena itu sering saya sampaikan, yang namanya orang menjadi tokoh partai, apalagi dia sebagai figur publik, sebagai kepala daerah, selain dia sebagai politisi dia juga harus bertindak sebagai seorang negarawan, paling tidak dia pada saat tertentu, harus lepas identitas partai-nya, identitas kelompoknya untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dan kepentingan yang lebih besar. Kemudian pengertian otonomi daerah itu juga kan daerah mempunyai kewenangan untuk menurus rumah tangganya sendiri, termasuk sumber-sumber pendapatan, tapi apa iya kabupaten/kota bisa berdiri sendiri, membiayai pendanaan sendiri, semua juga banyak bertumpu kepada pemerintah pusat. Jadi titik tekan otonomi daerah itu seperti apa kalau misalnya pemerintah pusat tidak turun tangan, termasuk kepala daerah seperti gubernur tidak melakukan eksekusi /action.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Ya demokratis. Yang namanya demokrasi kan memang gitu, ada demokrasi langsung ada demokrasi perwakilan, dan dipilih oleh DPRD juga termasuk proses yang demokratis. Karena rakyat sudah mendelegasikan haknya melalui anggota DPRD untuk menentukan calon pemimpinnya. Jadi itu namanya demokrasi sistem perwakilan. Ini juga kan sesuai dengan sila ke empat pancasila, yaitu permusyawaratan perwakilan.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Ya itu kan belum tau ya, kalau seperti itu jadi berandai-andai, tapi kan kalau kita sepakat untuk membenahi system demokrasi kita, tentu kita harus berkomitment, semacam kita menandatangani pakta integritas bahwa DPRD tidak akan melakukan itu. Bahwa setelah berjalan kemudian melakukan itu, kan jadinya kita berandai-andai, tetapi kita tidak menghjindaki itu, tidak menghendaki money politic, kita menghendaki proses demokrasi untuk menentukan pemimpin kita satu periode kedepan. Kalau kita sekarang sudah berbicara, ada money politic, dan lainnya itu kan kita jadi berandai-andai. Dan tugas kita semua, tugas kamu, tugas saya, tugas elemen masyarakat berusaha kalau semua itu jadi dilakukan bersama kita mengawal, malah kita ingin membrantas.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?

Jawab: Ya iya donk, pemilu yang mengakomodir dari perolehan suara yang terbanyak itu kan sudah sangat baik, siapa yang disenangi oleh rakyat, siapa yang dipilih oleh rakyat, berdasarkan jumlah perolehan suaranya, itulah yang punya hak dan duduk menjadi anggota legislatif, baik di kabupaten/kota, provinsi, ataupun DPR RI. Itu sesuatu yang baik menurut saya, dalam bahasa lain ini merupakan anugrah politik. Kalau seperti dulu masih berdasarkan sistem no urut, artinya kan hanya berpikir tentang partai, siapapun orangnya kan partai yang menentukan. Kalau ini kan rakyat yang menentukan, mau no berapapun dia, dari partai tersebut. Nah partai disini hanya menjadi fasilitasi untuk mengatur mekanisme yang ada baik di DPR atau pemerintahan. Kalau tidak ada mekanisme yang mengatur juga kan menjadi kacau, dan berdiri sendiri-sendiri.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: Kalau sikap partai setuju. Ya seperti yang kita katakan diawal tadi, dalam evaluasi kita justru pilkada langsung tidak mengangkat harkat dan martabat negara ini secara signifikan, dalam bahasa lain justru demokrasi tidak sebanding dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa ini, yang tadinya dengan adanya system langsung diharapkan menghasilkan proses-proses politik yang baik, tapi sekarang ini kan justru terpuruk. Oleh karena itu kita sependapat oleh wacana ini untuk dikembalikan lagi kepada DPRD.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Solusi yang tepat adalah kita harus menyusun buget itu sekecil mungkin, tapi kalo buget itu kan harus ada karena negara harus menanggung juga soal itu. Oleh karena itu selaku penyelenggara juga harus punya komitmen, sebagai pengawas harus punya komitmen bagaimana menyelenggarakan dan mengawasi anggaran ini agar tidak terlalu membengkak, dan tidak terlalu dihambur-hamburkan, karena kita berkomitmen seberapapun, sekecil apapun, sepersen pun anggaran yang dikeluarkan itu kan uang rakyat, ya harus dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Apalagi seperti situasi seperti sekarang ini Lampung, infrastruktur kita, kemudian program-program yang belum terselesaikan, itu tidak boleh menggarkan anggaran yang terlalu besar. Kalau soal penyelenggaraan pilkada serentak menurut saya itu kan soal teknis, soal kita mengiritnya apa iya pilkada serentak itu bisa mengirit. Mau mengatur periodisasinya itu saya pikir tidak efektif nanti. Jadi maksud saya itu saya ingin menyampaikan belum tentu dari sisi anggaran penyelenggaraan serentak itu berbanding lurus dengan hasil yang ingin kita dicapai, belum lagi kita mau mengatur periodisasi serentak seluruh Indonesia. Penyelenggara negara ini kan belum tentu ada masalah, iya kalau tidak ada masalah, bayangkan misalnya dari seluruh 400 lebih kabupaten/kota ini mengadakan gugatan ke MK, apa tidak kewalahan. Itu kalau menurut saya terlalu berlebihan kalau kita terlalu menghendaki pilkada serentak. Jadi menurut saya pilkada serentak itu bukan solusi, hanya teorinya saja yang enak, tetapi pelaksanaannya belum tentu.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam

pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Pendidikan politik masyarakat. Sekarang, kalau kamu bayar orang untuk milih. Oh ini, urusannya adalah memilih pemimpin untuk lima tahun yang akan datang, bukan un. Mau dikasih apa juga tidak pernah akan goyah, tetap pada pilihan saya. Jadi jangan disalahkan kadindat saja, masyarakat kita juga keliru dan salah. Orang itu masyarakatnya yang minta, maka persoalannya kan rakyat juga, tidak ada kesadaran kalau tidak dikasih amplop gak mau milih. Berbicara masalah pendidikan politik juga memang menjadi tanggung jawab partai politik. Salah satu pilar demokrasi juga kan adalah partai, tapi tentunya bukan hanya partai saja, tapi termasuk pers, akademisi, LSM, mahasiswa dan banyak yang harus terlibat dalam proses ini. PKB sudah melakukan, pasti, pendidikan politiknya dilakukan formal dan non formal, misalnya dalam sebuah pengajian, saya disuruh ngomong, saya bicara tentang pendidikan politik. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan, pertemuan-pertemuan, koordinasi, dan lain sebagainya, itu juga kan termasuk bagaimana kita merencanakan untuk melakukan pendidikan politik di masyarakat. Orang masyarakat juga sudah kebablasan, dan banyak juga yang melakukan pembodohan politik bukannya pendidikan politik.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Tidak setuju saya, justru evaluasi kita untuk melakukan perbaikan demokrasi. Evaluasi kita pemilihan langsung justru membuat masyarakat kita menjadi lebih bodoh, membuat masyarakat pengetahuan politiknya menjadi semakin ambruk, semakin bias, jadi buat apa diteruskan. Kalau kita teruskan itu yang namanya kita melakukan pembodohan, nah kita ingin memperbaiki sistem demokrasi kita ini.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Seorang anggota dewan itu kan yang pertama dia merupakan representasi dari rakyat, sekarang ini kan mekanisme berasal dari dapil, dia merupakan representasi dari dapilnya dan dipilih berdasarkan suara terbanyak. Kemudian yang kedua dia merupakan representasi dari partai, sebagai seorang anggota dewan, dia harus menyadari dua fungsi dan perannya itu. Sebagai seorang anggota partai dia harus. Sebagai seorang rakyat dia harus. Kalau dia di DPR itu mempunyai hak-hak politiknya sebagai anggota dewan. Tetapi dia juga sebagai perpanjangan tangan dari partai yang sedang ditugaskan oleh partai untuk memangku jabatan disitu. Dan dua fungsi itu tidak bertentangan, tidak bersinggungan, dia sinergi, karena rakyat dan partai itu kan visinya harus sama. Jadi kebablasan kalau orang menganggap apatis, tidak mau berpartai, kita kan

negara demokrasi. Jadi kalau ada orang yang apatis terhadap partai, itu kan namanya kemunduran, orang dia itu punya hak koq, kalau dia tidak mau menggunakan hak politiknya dengan baik dan benar, itu kan salah dia.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur?

Jawab: Nah kalau terkait itu kita ada mekanismenya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang seluruh tahapan itu mencerminkan apa yang dikendaki oleh rakyat. Keinginan rakyat itu, kemudian masuk kedalam sistem kita malalui mekanisme dan tahapan kita baru keluarlah yang namanya sikap partai.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Sebagai anggota DPRD dari PKB, sebagai perpanjangan tangan dari partai, partai juga mempunyai hak memberikan pencerahan, partai juga mempunyai hak untuk memberikan pengarahan. Tetapi akhirnya itu kan tergantung dari penilaian orang-perorang, karena dia juga kan punya hak politik disitu, dia punya otoritas, dan hak untuk berdaulat untuk menentukan pilihannya.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Ya kan pemilihannya rahasia, jadi bagaimana kita tahu. Jadi prosesnya kan bukan voting terbuka, tapi voting tertutup, karena pemilihannya itu dibalik suara dan rahasia, siapapun tidak boleh tahu siapa yang dia pilih. Jadi bagaimana kita bisa tahu apakah kader kita itu misalnya menentukan pilihan sesuai dengan arahan partai atau tidak.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Kol. (Purn) Hi. Sunardi, S.Sos., MH.
Asal Partai Politik : Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
Jabatan : Ketua DPD PKPB Lampung
Alamat Kantor : Jl. WR. Monginsidi No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung 35215
Alamat Rumah : Jl. Hendro Suratmin No. 117 B, Sukarame, Bandar Lampung.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung
Umur : 64 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Jawa
Pendidikan Terakhir : Magister Hukum Unila (S2) / Lemhanas RI
No Tlp / HP : (0721) 701552
Waktu Wawancara : Jumat, 05 Oktober 2012 / 10.05 – 10.40 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Komisi III DPRD Provinsi Lampung



(Proses wawancara dengan Ketua DPD PKPB Provinsi Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: Memang dari sisi beberapa sudut pandang bahwa pemilihan gubernur melalui DPRD sudah bisa mewakili aspirasi dari masyarakat. Karena sebenarnya partai politik adalah partai yang bisa mewakili aspirasi masyarakat. Sebagai contoh adanya anggota DPRD ini adalah merupakan perwakilan rakyat atau representasi dari seluruh masyarakat. Selain itu juga menurut saya, gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, oleh karena itu untuk sisi efisiensi, ekonomis, kemudian juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya efek-efek pengelompok-pengelompokan itu seyogyanya memang melalui DPRD. Karena disana tersirat bahwa keterwakilanpun sudah merupakan representasi.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Betul, biaya penyelenggaraan pilkada selama ini sebenarnya memang terkesan mahal. Nah saat ini Mendagri sedang mewacanakan pembatasan jumlah-jumlah anggaran-anggaran untuk pilkada.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Pembiayaan politik yang bersal dari calon sebenarnya juga berlaku hukum ekonomi. Jadi hukum ekonomis ini begini, kalau barangnya satu, tapi permintaannya banyak, tentu ada kecenderungan seseorang itu bersaing, kalau perlu tidak profesional pun dijalankan, karena orang berkecenderungan barang satu dimiliki orang lain, tapi kalau misalnya diwujudkan dalam bentuk katakana ada indikator-indikator yang jelas, nah itu mestinya ada sistem yang mengatur untuk indikator tentang calon itu apa. Contoh, misalnya seorang calon itu dikatakan sehat, fisik jasmanai dan rohani, rohani dia psikotes, itu sudah ada kriterianya dan kesimpulannya sudah ada. Fisik itu tidak cukup hanya kesehatan aja, fisik itu hanya mungkin lari-lari. Kembali ke persoalan pokok, harapan saya bahwa dari sisi efisiensi belum ada yang aturan dari pemerintah yang mengatur untuk berapa si untuk biaya pilkada, bahwa merevisi perjalanan selama ini sangat tidak efisien, sangat menggelembungkan anggaran, pemerintah akan mengatur bahwa baliho yang boleh dipasang

adalah cukup dibeberepa titik saja. Semuanya harus diatur oleh pemerintah dengan berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi.

Itu saya sebenarnya sangat mendukunglah apa yang disampaikan oleh mendagri, tetapi itu dari sisi statement-statement umum, pernyataan umum, mau saya adalah betul-betul ada kajian yang lebih fokus, apakah benar bahwa misalnya dengan adanya biaya politik yang cukup besar mengarah pada kecenderungan terpilih itu akan melakukan korupsi. Tetapi kalau menurut saya tidak semuanya seperti itu, contoh kalau mereka memang ada orang satu anaknya orang kaya, nah yang kedua mereka itu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kesadaran wawasan kebangsaan, itu dia tidak akan seperti itu. Jadi apa yang dikatan oleh mendagri itu boleh dikatakan benar, tapi belum mutlak, karena masih harus perlu kajian mendalam yang lebih benar, lebih jauh, analisisnya yang lebih tajam terhadap kesimpulan itu. Misalnya Jokowi berapa modal atau jumlah biaya yang dikeluarkan, tetapi kan modal besar yang keluar itu adalah sangat manusiawi apabila dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keinginan kemudian mereka juga ingin sukses, artinya kan ya gak apa-apa, kadang-kadang kita ini masih punya jiwa seperti itu, tetapi nyaman untuk prestise dan prestasi.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab: Itu boleh-boleh saja, karena memang Indonesia kita saat ini sedang pada posisi mencari warna, sebenarnya kita ini mau kemana si. Kalau saya melihat, ini suatu perjalanan yang kadang-kadang perlu dilakukan revisi-revisi, belum lagi karena faktor kepentingan. Jadi politik itu harus kepentingan yang beretika dan berwawasan kebangsaan. Selama ini, politik itu hanya kepentingan-kepentingan saja, dia tidak menggandengkan bahwa itu harus beretika dan berwawasan kebangsaan. Jadi posisi Indonesia sebenarnya masih mencari format dan posisi-posisi yang lebih tepat. Negara Amerika yang sudah ratusan tahunpun mereka merdeka masih ada kekurangan-kekurangan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar saja, tapi harus ada evaluasi khusus untuk itu.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Sebenarnya itu sudah memenuhi persyaratan proses yang demokratis apabila gubernur dipilih oleh DPRD, karena DPRD sudah memenuhi representasi beberapa masyarakat yang diwakilinya di daerah. Memang ada beberapa orang yang tidak berpartai, dan mereka mengatakan bahwa ini belum mewakili representasi saya, tetapi sistem yang berlaku di negara kita, orang yang ingin menyampaikan aspirasi, mereka harus melalui

partai politik. Kalau mereka tidak berpartai berate mereka mau menyalurkan aspirasinya ya tidak melalui politik. Padahal di sistem kita semua itu sudah terafiliasi melalui partai politik. Maka partai-partai politik diberi tugas oleh negara untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, agar tau hak dan kewajibannya. Apa haknya, pada saat pesta demokrasi, dia harus menggunakan hak pilihnya.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Itu harus dilakukan kajian-kajian. Pada beberapa periode yang lalu pernah gubernur dipilih melalui DPRD, nah mestinya pemerintah harus melakukan kajian, penelitian, dimana ruang-ruang kosong yang memungkinkan lebel yang seperti itu. Nah menurut saya, kalau menurut saya bahwa kalau melalui dewan akan terjadi efisiensi, masyarakat tidak terkotak-kotak, calon gubernur tidak begitu langsung perlu berhadapan langsung dengan rakyat. Nah sekarang kalau kita masih juga tidak dirubah sistemnya, ya akan begitu saja. Tetapi saya yakin nanti pemerintah akan melakukan evaluasi kalau melalui DPRD pasti dibuat rambu-rambu yang tentunya dapat menghambat, membatasi, terhadap statement-statement yang seperti itu. Proses *money politics* keanggota DPRD, itu bisa saja terjadi, tapi masyarakat harus memahami bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan *money politic*. Tapi saya menjamin sepertinya tidak, makanya kita harus paham betul-betul jangan sampai orang itu kebablasan, makanya didalam hukum sudah dibatasi sebenarnya, kepada siapaun yang menyuap, yang disuap, menyogok atau disogok, mereka kena hukum semua sanksinya.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?)

Jawab: Jadi representasi ini, peran anggota DPRD terhadap masyarakat pemilihnya, jangan hanya dilihat dari sisi kehadirannya dalam mengunjungi masyarakat. Kehadiran kita adalah dalam program pembangunan, dan otonomi daerah. Jadi pengawalan kita adalah mengawal proses pembangunan untuk masyarakat, kemudian program itu dibawa, dan diperjuangkan untuk diadu apakah program pemerintah itu akan digolkan. Inilah yang sebenarnya yang dilakukan terkait fungsi representasi, partisipasi, dan peran anggota DPRD terhadap konstituennya. Terkait pelaksanaan penyerapan aspirasi, anggota DPRD dilakukan melalui program reses untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya, terkadang juga tanpa melalui program reses kita melakukan turun kelapangan.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: Kalau menurut saya, wacana-wacana tersebut boleh-boleh saja, wacana itu wajib kita apresiasi. Karena bagaimanapun juga sebenarnya sebuah wacana yang sekarang ini merupakan representasi dari pemerintah untuk penyelenggaraan pilkada menjadi sebaik mungkin. Itu kan merupakan representasi, evaluasi, dan kajian pemerintah yang cukup untuk dihukumkan. Jadi ya kita apresiasi dan pahami dan mudah-mudahan harapan kita pada lembaga penentu aturan atau perundang-undang, mereka benar-benar meletakkan, menjauhi kepentingan pribadi dan golongannya dan mengedepankan kepentingan umum. Jadi saya atas nama pribadi dan partai setuju, sebatas itu dilaksanakan secara professional dan proposional, karena ternyata mudharat dan manfaatnya masih banyak manfaatnya dipilih DPRD ketimbang dipilih langsung.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Jadi begini, kalau yang efektif memang itu bisa dilaksanakan pilkada secara serentak, tetapi kalimat itu tidak mudah, karena pengembangan demokrasi yang diharapkan sebenarnya itu tentu mengeluarkan biaya anggaran dan itu adalah konsekuensi. Jadi kita sebenarnya jangan terlalu terpancing kepada persoalan anggaran, tetapi kita melupakan bahwa sebenarnya sudah patutkah anggaran itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi anggaran yang digunakan, sistemnya harus betul-betul tegas, sehingga solusi yang paling tepat saat ini memang kalau mau benar-benar efektif dan efisien dalam hal anggaran adalah melalui DPRD provinsi.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Jadi kalau menurut saya segeralah dikeluarkan seperti wacana seperti yang sekarang muncul oleh mendagri tentang pembatasan-pembatasan biaya kampanye. Dibuat sistem yang terbaru, misalnya bagaimana adu argumentasi dengan program para calon. Kemudian kalau perlu di test fisik, jadi itu tidak ada main yang begini-begini, pengawasan dan sanksi harus diberikan secara keras dan tegas. Kemudian yang incumbent yang mencalonkan lagi itu harus mundur dari jabatan, jadi tidak untuk main-main.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Saya kurang setuju kalau itu dikatakan sebagai kemunduran demokrasi, karena kebanyakan orang tidak melihat endingnya, orang memaknai demokrasi sekarang seolah itu semua harus dipilih oleh rakyat, mereka tidak melihat aturan yang selanjutnya. Sebenarnya gubernur itu siapa, kalau bupati/walikota langsung seperti sekarang, karena seiring dengan munculnya otonomi daerah, dimana bupati/walikota itu diberi kewenangan yang luas untuk mengatur ekonomi rumah tangganya masing-masing, jadi pantaslah mereka untuk demokrasi secara langsung. Karena memang vis to vis and commando cendaly, dia akab berhadapan langsung dengan rakyat, tapi kalau gubernur kan sekarang tidak bisa langsung memerintah bupati/walikota, lingkupnya hanya mengkoordinir wacana untuk provinsi agar tujuan jangka panjang pemerintah pusat ini juga terealisasi sampai kebawah. Jadi memang perlu dikaji, pada level-level mana yang harus dipilih oleh rakyat secara langsung, tetapi bukan juga meninggalkan demokrasi, itu tetap pemilihan oleh dewan mencerminkan demokrasi, kalau memang selama ini dewan dianggap sebagai representasi komunitas masyarakat.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Pola hubungannya begini, anggota DPRD adalah kepanjangan dari partai. Karena partai ini, PKPB misalnya mempunyai anggota banyak, dan partai politik itu adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, jadi mereka harus terwadai dalam partai politik. Kemudian partai politik untuk bisa memperjuangkan tujuan masyarakat ini harus diperjuangkan melalui program yang bisa memberikan agar cita-citanya terwujud melalui pemerintah. Oleh karena itulah ada DPRD yang merupakan kumpulan dari berbagai macam partai politik yang diukur melalui pemilu.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur?

Jawab: Sebatas kader dipandang oleh partai siap dan pantas untuk di adu, kenapa tidak. Karena orang yang sudah melalui kader militant, tetapi sekarang kader itu belum tentu yang memenuhi kriteria membina partai sekian lama, jadi kader bisa dibentuk secara mendadak yang hanya dikasih KTA. Ya makanya sebatas kita bisa professional, bisa dipertanggung jawabkan secara lahir dan batin, partai kita siap.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Ya harus, itu prinsip, jadi tidak boleh mereka membantah, jadi apagunanya ada komando kendali, apa gunanya ada payung hukum, makanya kita yang namanya kader itu ada aturannya, taat dan solid, prinsip itu.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Ya dikenakan sanksi, sanksi partai ada, siap dicopot. Ya namanya kita itu representasi dan kepanjangan tangan dari partai, mulai dari mulut, mata, tangan, kaki dari partai. Apalagi kita itu partai tentara jadi tidak ada alasan.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Hi. MC. Imam Santoso, SH, MH.
Asal Partai Politik : Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Jabatan : Ketua DPW PPP Lampung
Alamat Kantor : Jl. WR. Monginsidi No. 158/98 Teluk Betung, Bandar Lampung 35215
Alamat Rumah : Jl. Palapa 04, No. 05, Labuhan Ratu, Bandar Lampung.
Pekerjaan : Swasta
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Jawa
Pendidikan Terakhir : Magister Hukum / S2
No Tlp / HP : 0811796614
Waktu Wawancara : Rabu, 10 Oktober 2012 / 11. 25 – 12. 05 WIB
Tempat Wawancara : Kantor DPW PPP Lampung



(Proses wawancara dengan Ketua DPW PPP Provinsi Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: Kalau kehendak pemerintah kan, RUU ini kan diajukan dari pemerintah, itu untuk gubernur dipilih oleh DPRD dan wakil gubernur adalah pejabat karier atau PNS, tapi ini juga banyak ditolak oleh kekuatan sosial politik yang ada di DPR RI yang berkaitan dengan wakil gubernur diangkat dari PNS, sehingga PPP pada dasarnya menginginkan pemilihan seperti sekarang, dengan sistem langsung, karena lebih aspiratif, lebih eksistensinya memang diakui betul oleh kehendak rakyat, persoalan biaya penyelenggaraan agak besar, ya relatif itu. Apakah pemilihan secara tidak langsung oleh DPRD biayanya juga tidak besar? Saya rasa sama. Justru tingkat money politiknya lebih tinggi melalui DPRD, karena saya sudah merasakan tiga kali memilih gubernur melalui DPRD, jadi tau persis itu.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Lah iya, tapi justru disamping biaya pemerintah itu akan lebih besar oleh si cagub ini melalui DPRD. Tapi kan masalahnya keberadaan gubernur ini eksistensinya lebih dikehendaki oleh rakyat, tapi kalau wakilnya kan belum tentu, tidak sama, jadi kepentingan-kepentingan politiknya lebih menonjol. Jadi transaksional istilahnya, untuk suara lebih besar. Terkait biaya penyelenggaraan yang mahal ya resiko, resiko dalam keterbukaan ya seperti itu. Ya kalau melalui perwakilan itu juga ya sama, seperti zaman orde baru. Mahalnya biaya langsung itu kan disesuaikan dengan jumlah penduduk, dan sesuai kemampuan daerah. Ya sekarang kita APBD sudah hampir dua triliun, ya cuma beberapa miliar kan kecil.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Sama saja, malah semakin besar biaya politik dipilih DPRD. Belum biaya perahunya, belum lagi per suaranya, bahkan menurut saya itu lebih besar biayanya, kalau alasannya itu. Saya tidak sepakat kalau dikatakan bahwa pilkada langsung biaya politiknya lebih besar dibanding dengan perwakilan, justru sebaliknya, artinya potensi korupsi justru semakin besar melalui DPRD.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab: Tapi sekarang ini, dengan otonomi seperti itu, timbulah raja-raja kecil dikabupaten, begitu gubernur mengadakan rapat kerja dengan bupati, itu yang dikirim asisten, dampaknya seperti itu. Maka pemerintah pusat, harus memberikan kewenangan lebih kepada gubernur. Gubernur bisa memberhentikan sementara bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, yang melanggar undang-undang dan sebagainya, sambil menunggu keputusan presiden melalui kementerian tentang hal itu. Jangan kewenangannya koordinasi aja, akhirnya bupati-bupati, walikota bahasanya kasarnya ngelunjuk dengan gubernur. Gubernur harus diberi kewenangan lebih, dengan dia dipilih langsung, maka dia wajar kalau gubernur diberi kewenangan lebih, kalau perwakilan mah wajarlah, namanya juga perwakilan.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Ya semi, karena DPRD itu kan wakil dari partai politik, partai politik itu mewakili rakyat, kan gitu makanya saya bilang semi, tidak demokratis betul. Karena perwakilan, dan itu rawan juga, karena nanti ada di diamankan sekian suara, dikarantina. Kemudian itu lebih rusak itu, peluang menangnya, orang sudah lebih tau, jadi tidak terbuka. Sekarang 75 anggota DPRD provinsi, saya punya uang, saya amankan 60, siapalagi yang mau nyalon. 50 sudah dipegang sama Imam Santoso, tidak mau, jadi terpaksa saya cari pendamping agar memenuhi syarat dua calon atau pasangan, jadi tidak mungkin lagi orang mau menang, orang sudah dipegang Imam Santoso 50 dari 75. Tapi kalau pemilihan langsung, semua orang beranggapan punya peluang. Itu lebihnya kalau langsung, kalau tidak langsung tidak demokratis, sudah ketahuan dulu siapa yang mau menang. Siapa yang punya uang itu yang menang, tapi kita buktikan dengan pilgub DKI, bahwa uang itu tidak segala-galanya. Kalau uang lebih banyak Fauzi Bowo dibanding dengan Jokowi itu. Itu saja ukurannya.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Ya betul, benar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?

Jawab: Jadi, ya betul, memang dipilih oleh rakyat konstituennya, anggota DPRD, harus bisa meminggirkan kepentingan golongan atau partai politiknya. Masalah perjuangan partai politik, ya internal masing-masing, tapi keberadaannya disana adalah wakil rakyat, karena dipilih bukan melalui sistem no urut, tapi berdasarkan suara terbanyak.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: PPP menghendaki pemilihan langsung, tapi karena hampir semua partai politik banyak yang menghendaki dan menyetujui draf itu, ya akhirnya PPP ngikut saja bagaimana hasilnya. Tapi pada prinsipnya kalau PPP memang lebih menghendaki dengan sistem pemilihan langsung.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Asal tidak ada kebocoran di KPU saja, kalau memang biaya memang rill untuk saksi, untuk KPPS, untuk bilik suara, dan kalau soal kotak suara dan sebagainya itu kan bisa pakai dari pemilu-pemilu yang sebelumnya, tinggal bagaimana KPU bisa melakukan penghematan. Kemudian bisa juga ditekan dengan diadakannya pilkada serentak juga bisa. Misalnya, nanti pada tahun 2015, itu ada 8 kabupaten/kota di Lampung itu akan ada pilkada, ya diserentakan saja dengan pilgub, itu lebih hemat mungkin tinggal menambah kertas suara saja, itu lebih hemat.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Ya yang terpenting itu pengawasan setelah menjabat sebagai kepala daerah, peran KPK untuk menyoroti pengawasannya, pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi. Dan sebenarnya juga tergantung rakyatnya, karena gini suatu produk itu tergantung dari bahan baku, tidak ada ceritanya para ulama berkumpul mau milih bandit jadi pemimpinnya. Kalau bahan bakunya baik, maka produknya akan berkualitas. Kalau mau siapa pemimpinnya ya tergantung siapa yang milih, kalau yang milih orang-orang amburadul, maka yang terpilih ya orang amburadul. Kalau diawal dia sudah mau disuap, ya akhirnya tidak akan baik, tapi kalau dipilih karena ingin memilih pemimpin berdasarkan hati nurani yang baik, maka hasilnya akan baik.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Setuju, seperti yang saya sampaikan di awal, tidak aspiratif, tidak legitimitas, dan eksistensinya kurang. Bukan kehendak rakyat, tapi kehendak oknum-oknum partai politik itu. Bisa saja saya mengintruksikan anggota dewan, pilih si A. Tapi kondisinya di dalam sana, bisa dia lari karena ada yang ngasih lebih, porsinya lebih besar, kemudian bisa saya tarik itu, saya PAW anggota dewan dari PPP itu, karena tidak patuh. Dan bukan mustahil pemilihan gubernur itu di matriks, dikasih tanda, misalnya coblos titik dibawah, titik diatas, titik disamping, apalagi sekarang kan sudah ada HP, kemudian bisa abis milih suruh foto, dan dikirim. Jadi lebih rekayasa, siapa yang banyak uang, dari satu miliar, naik dua miliar, naik terus dan tidak berhenti itu. Kemudian dihitung itu, tiga tahun kembali itu. Tapi kalau dipilih rakyat, kamu merasa dipilih di Lampung Barat, atau Lampung Utara, saya punya di daerah Pesawaran, Tanggamus, dan sebagainya. Mana kita tahu itu Indra Ismail gak dapet suara, Fauzan kalah, tapi kan betul daerah kota agung Fauzan menang. Apalagi pilgub ini kan mau ada Berlian Tihang, Herman HN, Alzier, Abdurrahman Sarbini, itu kan gajah-gajah semua, itu bisa kuat-kuatan itu, eyel-eyelan.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Pertama ya hubungannya garinya komando, dia dikendalikan dari sini. Yang kedua, koordinasi, yang ketiga konsultasi. Komando memang dia disini komandonya mereka kan mewakili partai, meskipun dipilih rakyat, tapi kan tidak menumbuh dari batu, kalau menumbuh dari batu, tapi kan lewat partai. Jadi mereka ada fraksi, kemudian di konsultasikan kepada kita, baru dikasih garis, ini, ini dan ini. Itu sebenarnya pola hubungannya, cuma saya sebagai ketua PPP memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anggota DPRD dari PPP untuk mereka berkreasi, berinovasi politik, sepanjang tidak melanggar kaidah-kaidah yang sebagaimana digariskan dalam AD/ART, karena partai kita ini kan partai Islam. Jadi apa yang mereka buat itu, pertama mendahulukan kepentingan Islam dan umat Islam, itu prinsip. Tidak ada program pembangunan yang tidak menyentuh rakyat, terutama untuk kepentingan umat Islam, kalau ada yang merugikan atau melemahkan eksistensi umat Islam di Lampung ini baru akan kita panggil, maka sekarang ini kan ada bantuan untuk guru mengaji, untuk umrah, itu kan yang mengusulkan kita.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur? Siapa?

Jawab: Ya kita lihat pada pemilu 2014 nanti, kalau PPP bisa mengusung kader sendiri ya kita akan munculkan kader, tapi sepanjang belum bisa mengusung kader sendiri karena tidak cukup perahunya ya kita akan koalisi. Dan koalisi harus tahu diri, misalnya kita hanya ada empat kursi atau lebih sedikit ya jangan minta posisi gubernur. Tetapi kalau UUnya nanti kan seperti itu ya apa boleh buat, ya sami'na wa ato'na saja kita.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Oh iya, pasti itu. Ya masa dia berasal dari PPP mau milih yang lain.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Seperti yang tadi saya bilang, kan di matriks, maka lebih demokratis dan lebih legitimite pilkada langsung. Ya tidak mungkin dia tidak akan memilih, orang dimatriks, dikasih tanda, setelah itu difoto dan HPnya dikasih semua dan dikasih uang, habis milih baru ditunjukkan. Itu kan transaksinya misalnya nilainya 10 untuk satu suara, tapi dikasih 7 dulu, baru sisanya setelah itu. Ya kalau missal dia tidak patuh ya dia bisa kita kasih sanksi, kan dia tidak menumbuh dari batu, jadi harus patuh dan taat pada partai.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Ir. Hj. Octoria Herrykadewi
Asal Partai Politik : Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
Jabatan : Sekretaris Umum DPP PDK Lampung
Alamat Kantor : Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jl. WR. Monginsidi
No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung 35215
Alamat Rumah : Jl. Sukardi Hamdani, Palapa 08 No. 02 B, Labuhan Ratu,
Bandar Lampung.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku : Lampung
Pendidikan Terakhir : S1
No Tlp / HP : 0811792387 / 081272112266
Waktu Wawancara : Rabu, 24 Oktober 2012 / 14.30 - 15.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor DPP PDK Lampung.



(Proses wawancara dengan Sekretaris DPP PDK Provinsi Lampung)

Pertanyaan:

A. Respons

1. Apa pendapat anda terkait wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI dalam RUU Pilkada?

Jawab: Kalau menurut saya, sebenarnya itu adalah untuk lebih meminimalkan terutama dari segi biaya, toh di dalam UUD itu kan hanya berbunyi dipilih secara demokratis, kemudian dalam pancasila itu juga kan permusyawaratan perwakilan. Jadi sebenarnya wacana itu bagus juga, karena kita kembali ke UUD, selain untuk meminimalkan dari segi biaya, waktu, karena seperti kita ketahui bahwa kalau pilkada langsung itu selama ini biaya kampanye, dari KPU, apalagi syukur-syukur kalau itu terlaksana satu putaran, kalau dua kali putaran itu kan tambah lagi, biayanya semakin besar, jadi sayang duitnya, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat yang lain.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung seperti selama ini menjadi salah satu alasan akan dikembalikannya mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Bagaimana tanggapan anda?

Jawab: Ya biaya yang besar itu kan, karena terlalu luasnya jangkauan kita, misalnya untuk PPK itu kan yang paling besar untuk honor yang dikeluarkan oleh KPU, tetapi kalau dia melalui perwakilan DPRD, saya rasa tidak akan sebesar itu artinya bisa lebih diminimalkan, jadi tujuan pemerintah sebenarnya itu. Dari segi peserta juga biaya kampanye juga bisa lebih ditekan, kalau langsung sudah habis berapa, tapi kalau perwakilan ya paling dari sekian jumlah anggota itu saja. Jadi bisa diminimalkan biaya penyelenggaraan kita yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3. Biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Apa pendapat anda?

Jawab: Dalam pilkada langsung setiap calon atau kompetitor itu kan berusaha mencari dukungan, gimana caranya untuk menarik perhatian rakyat, kalau dia sudah turun pasti akan berusaha semaksimal mungkin, tanpa batasan, walaupun sebenarnya ada batasan dana kampanye sekian, tapi kenyataan di lapangan karena supaya bisa menarik tadi, jadi untuk meminimalkan itu agak susah, tetap besar itu, jadi sayang apalagi kalau misalnya tidak jadi. Tetapi kalau melalui perwakilan paling kan hanya partai-partai saja. Untuk beli perahu saja mungkin saudara tau kan, berapa biayanya yang luar biasa, untuk bergerak keluar lagi itu dana. Kalau melalui perwakilan ya mungkin hanya perahu saja, setelah itu partai yang menggerakkan.

4. Apa tanggapan anda bahwa titik berat otonomi daerah selama ini berada di kabupaten/kota, bukan provinsi serta posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur lebih banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat ketimbang tugas daerah?

Jawab : Iya benar, memang sejak otonomi daerah, justru malah tumbuh raja-raja kecil di daerah, karena merasa dipilih langsung, banyak kepala daerah yang tidak tunduk terhadap gubernurnya, kalau ada apa-apa langsung ke pusat tanpa melalui gubernur. Jadi ini memang merupakan salah satu kelemahan otonomi daerah saat ini. Tapi kalau memang ada wacana pengembalian mekanismenya dipilih DPRD, mungkin bisa kembali lagi seperti dulu lagi.

5. Apakah menurut anda, gubernur yang di pilih oleh DPRD Provinsi, dapat dikatakan sebuah proses yang demokratis ?

Jawab: Bisa, karena kita anggota DPRD itu kan mewakili masyarakat dari dapil-dapilnya, jadi ini merupakan keterwakilan masyarakat/konstituennya dari daerah, jadi cukup mewakili lah menurut saya.

6. Apa tanggapan anda, bahwa meskipun gubernur kembali di pilih oleh DPRD Provinsi, tidak akan menghilangkan praktik *money politics*, justru hanya perpindahan dari kantong masyarakat ke kantong anggota DPRD ?

Jawab: Ya sebenarnya tidak juga, karena kita disitu kan anggota mewakili dari partai, ada mekanisme disitu. Kemudian anggota dewan juga ya masih punya hati nurani lah, jadi mudah-mudahan praktek tersebut akan sangat kecil untuk terjadi.

7. Kemudian bagaimana pendapat anda tentang posisi anggota DPRD adalah representasi/wakil dari rakyat, karena pada pemilu 2009 yang lalu anggota DPR/DPRD di pilih dengan mekanisme suara terbanyak, dalam kaitan ini mestinya anggota DPRD harus melihat suara/aspirasi dari rakyat/konstituennya?

Jawab: Ya dengan sistem suara terbanyak dan bukan no urut, artinya dengan suara pilihan rakyat yang terbanyak, dia lebih berhak untuk mewakili. Kalau berdasarkan nomor urut kan bisa saja dia menaruh berdasarkan kedekatan, atau praktek-praktek lainnya. Ya karena kita sudah dipilih rakyat berdasarkan suara terbanyak tadi, harus menyampaikan suara dan aspirasi dari rakyat, makanya dengan kita turun kebawah seperti reses atau kunjungan lainnya ke dapil, kita tahu aspirasinya apa, keinginan mereka bagaimana, ya itulah saatnya kita yang mewakili mereka menyampaikan aspirasinya agar dapat ditindak lanjuti.

B. Sikap

8. Bagaimana partai politik anda menyikapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD provinsi tersebut yang sedang dibahas dalam RUU Pilkada?

Jawab: Ya kalau kita sebenarnya mengikuti saja apa yang mau digariskan oleh pemerintah, jadi mana yang terbaik. Kita sebenarnya pingin dipilih langsung, tetapi karena berbagai hal, terutama kita juga tidak punya kekuatan di DPR RI, ya kita menerima saja, kita netral mau dipilih langsung silahkan, dan dipilih oleh DPRD juga silahkan, karena semua juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

9. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya penyelenggaraan pilkada terutama Pemilihan Gubernur yang sangat mahal tersebut?

Jawab: Sulit ya, karena sebenarnya biaya terbesar penyelenggaraan itu yang paling besar adalah untuk honor-honor panitia penyelenggara, dan itu kan harus tetap ada kan, seperti kemarin anggaran yang disusun oleh KPU itu sekitar 200 Miliar-an untuk dua putaran, nah komponen terbesar disitu cuma honor, sosialisasi dari KPU itu kecil dan terbatas tetapi untuk honor paling besar. Kemudian wacana pilkada serentak itu bagus juga, namun untuk menyatukan jadwal yang sulit, apalagi sekarang juga kita masih menunggu kepastian hukum daalam UU. Jadi untuk memulainya itu yang agak sulit, tapi kalau itu memang bisa serentak itu bagus, seperti yang sudah berjalan di Aceh, itu langsung pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati/walikota, jadi biaya juga sekalian, ya tinggal UU nya nanti mengatur bagaimana.

10. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan biaya politik yang mahal dan yang dikeluarkan oleh kandidat cukup besar dalam pilkada langsung, yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?

Jawab: Ya itu sebenarnya juga kembali kepada orangnya, dimana kalau dia memang pengabdian, dia tidak akan memikirkan apa yang sudah dikeluarkan terkait biayanya, dan lain sebagainya. Tetapi karena orang sudah duduk di kekuasaan godaan itu banyak, kecuali kalau memang dia memikirkan rakyat, bagaimana dia memakmurkan, dan sesuai janjinya selama kampanye, dia tidak akan seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya orang yang sudah duduk di kekuasaan itu duduk manis saja, artinya cukuplah, tidak perlulah yang untuk korupsi dan sebagainya. Cuma yang namanya manusia, apalagi goadaan, iman tidak kuat, ya bisa saja karena kepingin untuk menutup apa yang sudah dikeluarkan, ya itu salah satunya. Jadi kalau niatnya untuk membangun tujuannya agar tidak tergoda, mudah-mudahan saja tidak.

11. Setujukan anda bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi, adalah kemunduran demokrasi ?

Jawab: Kemunduran kalau untuk kebaikan ya tidak masalah, karena apa yang kita lihat selama ini pemilihan langsung ya ada baiknya dan ada mudharatnya, tapi kalau memang lebih banyak mudharatnya ya kita kan harus cari yang terbaik, karena Indonesia ini juga kan masih dalam proses, ya tinggal diatur dalam ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau dikatakan sebagai sebuah kemunduran demokrasi ya tidak juga, tapi kalau untuk yang lebih baik ya tidak masalah donk.

12. Bagaimana pola hubungan partai (anda) dengan anggota DPRD yang berasal dari partai (anda)?

Jawab: Kita ada mekanisme, dalam hal ini ya kita aturan partai tetap kita ikutin, dan kita di dewan juga mewakili partai politik. Jadi kita sebagai anggota dewan dari PDK ya kita harus patuh, mekanismenya dan aturannya seperti apa kita taat, seperti apa yang menjadi kewajiban, tugas kita sebagai anggota dewan.

13. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mencalonkan kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur?

Jawab: Mungkin kalau untuk saat ini belum ya, karena kita hanya memiliki dua kursi di DPRD provinsi, tapi nanti setelah pemilu 2014 dan kita cukup untuk mengusung calon sendiri ya Insya Allah kita akan mengusung kader internal kita.

14. Seandainya gubernur jadi di pilih oleh DPRD Provinsi, apakah partai anda akan mengintervensi/memerintahkan/mengintruksikan anggota DPRD dari partai anda untuk memilih gubernur yang di usung partai anda?

Jawab: Ya kita lihat dulu calonnya, tetapi kita selaku kader partai ya harus mengikuti apa kata partai donk. Karena kita disana kan merupakan perpanjangan tangan dari partai, jadi kita tetap mengikuti partai.

15. Bagaimana jika seandainya anggota DPRD yang berasal dari partai anda tidak mematuhi atau tidak memilih calon gubernur yang di usung partai politik anda ?

Jawab: Ya mungkin ada sanksinya lah ya, orang kita ini sebagai perpanjangan tangan dari partai. Jadi kita ya ikutin mekanisme dan aturan partai donk.